

# MAJALAH DISKOMINFO AMAZING



Edisi  
Khusus  
HARI JADI GARUT  
Ke-204

3 TAHUN RUDY-HELMI MEMIMPIN

**TEROBOSAN**  
**MENGGAPAI KEMAJUAN**



PEMERINTAH  
KABUPATEN GARUT

Amazing  
Garut



# DIRGAHAYU GARUT KE-204 TAHUN 2017

MARI KITA WUJUDKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI  
SERTA LINGKUNGAN YANG SEHAT, AMAN, DAN NYAMAN

*Gebyar*  
**BUDAYA**  
**Garut 2017**

*Mapag Abad Kadigjayan*  
*Hari Jadi Garut Ka -204*

(11 Februari - 23 Maret 2017)

**PAMERAN INDUSTRI PARIWISATA**

*(Multi Produk)*

**NAPAK TILAS**

**HELARAN BUDAYA**

22 Seni Unggulan Garut  
5 Kabupaten/Kota di JABAR  
5 Provinsi di Indonesia  
4 Negara

KONTES KETANGKASAN DOMBA GARUT

DEVILE BATIK GARUTAN

PAWAI KENDARAAN HIAS

ADVENTURE WISATA GARUT

GARUT CAR MODIFICATION CONTEST

ENDURO WISATA DI TANAH LEGENDA

KIRAB CONGCOT

DOMBA CATWALK

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



## SEKAPUR SIRIH



Pembaca yang budiman,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya, kita semua bisa beraktifitas menunaikan tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya. Atas izin-Nya pula, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut dapat menyajikan majalah edisi khusus Hari Jadi Garut (HJG) ke-204 tahun 2017 dengan tema “Mapag Abad Kadigjayan” yang ada di tangan pembaca saat ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Garut, Bapak H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP, Wakil Bupati Garut, Bapak dr. H. Helmi Budiman, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Bapak H. Iman Alirahman, SH., M.Si, beserta seluruh jajaran pimpinan SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang telah memberikan dukungan penuh atas penerbitan majalah ini.

Dalam majalah edisi khusus HJG ke-204 ini kami mengulas berbagai upaya yang telah dilaksanakan dan rencana ke depan dari stakeholder baik eksekutif maupun legislatif di Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut, mulai dari Bupati Garut Bapak H. Rudy Gunawan, Wakil Bupati Garut Bapak dr. H. Helmi Budiman, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Bapak H. Iman Alirahman, Ketua DPRD Garut Bapak Ade Ginanjar, S.Sos hingga SKPD.

Disamping itu, ditampilkan pula ulasan mengenai berbagai aktifitas Bupati, Wakil Bupati, Sekda, maupun SKPD dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Oleh karena itu, melalui penerbitan majalah edisi khusus HJG ke-204 ini, diharapkan dapat menjadi sumber referensi mengenai kebijakan dan program-program pembangunan Kabupaten Garut yang akan dilaksanakan khususnya di tahun 2017 ini serta pencapaian-pencapaian yang telah ditorehkan di tahun-tahun sebelumnya di bawah kepemimpinan Bupati Garut Bapak H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP, dan Wakil Bupati Garut Bapak dr. H. Helmi Budiman dengan terobosan-terobosan yang telah dilaksanakan.

Berbagai program pembangunan dan upaya peningkatan pelayanan publik yang telah dilaksanakan merupakan bukti komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera”.

Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan penulisan maupun cetak pada tulisan-tulisan yang kami sajikan di majalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca budiman kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Dirgahayu Garut ke-204. Selamat membaca!  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Garut

**Drs. H. Nurdin Yana, M.H.**



6

### 3 TAHUN RUDY-HELMI MEMIMPIN TEROBOSAN MENGGAPAI KEMAJUAN



24

### BERTAHAP TUNTASKAN JANJI POLITIK



28

### SETDA TOPANG PENCAPAIAN VISI PEMDA GARUT

Garut Pangirutan, dua kata yang mungkin hanya ada di daerah parahyangan. Daerah ini menjadi begitu cantik bahkan memikat orang luar menatap merasakan indah dan kesejukan udaranya. Kabupaten Garut tempo dulu kerap dikenal dengan sebutan “Swiss van Java”, karena ketertiban, kebersihan serta keindahan alamnya yang sejuk dan menawan, sehingga banyak memikat kalangan masyarakat dari Eropa.



32

### DPRD PASTIKAN PEMBANGUNAN MENGACU RPJMD

36 UU ASN, The Right Man In The Right Job

38 Tingkatkan Keterjangkauan Layanan Kesehatan

40 RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2017, Fokus pada Pelayanan

42 Disdik Berupaya Dongkrak APK APM

44 Akomodatif Industri, Tak Kesampingkan Pertanian

46 Memperkuat Daya Tarik Destinasi Wisata

48 Membangun Daya Saing Tenaga Kerja



Seni Raksa Dogar (Raksasa Domba Garut)/sumber: Disparbud

---

Diterbitkan Oleh	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut
Pelindung	: H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP. (Bupati Garut) dr. H. Helmi Budiman (Wakil Bupati Garut)
Penasehat	: H. Iman Alirahman, SH., M.Si (Sekda Garut)
Penanggung Jawab	: Drs. H. Nurdin Yana, MH. (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut)
Ketua	: Ricky Rizki Darajat, SH, M.Si
Tim Kreatif	: Muhamad Ihsan Muslim, Beni Wahyudi, Yogi Gunawan
Reporter	: Nurhadimiharja, S.Sos, Johan Hadi Kurnia, SH., Tantan Tania
Fotografer	: Fendi Dian Conisa, Cuncun Sunarya, Yogi Budiman
Editor	: M. Anies Fikry, SE, Tantan Herdiana, SIP, Dience Gurnita, SE., Anita Saraswati

---

### **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut**

Jl. Pembangunan No. 181 – Garut Telp (0262)489500  
www.garutkab.go.id email: webmaster@ garutkab.go.id

204 Tahun Kabupaten Garut, Mapag Abad Kadigjayan

Utama



3 TAHUN RUDY-HELMI MEMIMPIN  
**TEROBOSAN**  
MENGGAJAI KEMAJUAN

Garut Pangirutan, dua kata yang mungkin hanya ada di daerah parahyangan. Daerah ini menjadi begitu cantik bahkan memikat orang luar menatap merasakan indah dan kesejukan udaranya. Kabupaten Garut tempo dulu kerap dikenal dengan sebutan “Swiss van Java”, karena ketertiban, kebersihan serta keindahan alamnya yang sejuk dan menawan, sehingga banyak memikat kalangan masyarakat dari Eropa.

**T**engok sejenak, tahun 1962 Presiden pertama RI, Ir. Soekarno berpidato di atas Babancong (mimbar bagi para pejabat tinggi), sekaligus memberi anugerah kota “Intan” (indah, tertib dan nyaman), termasuk sarat gemerlap lampu dengan

sejumlah berkas sinar di malam hari, karena kota ini berada di bawah lembah yang di kelilingi pengunungan; Gunung Cikuray, Gunung Api Papandayan, Gunung Api Guntur, Gunung Talaga Bodas serta Gunung Karacak.

Para pendatang dari Eropa menyebutnya dengan ungkapan “mooi” (indah) dan sering bermalam di Villa Dolce (sekarang menjadi Islamic Center), hotel Papandayan serta hotel Ngamplang termasuk Charlie Chaplin. Bahkan, waktu itu Ratu Wilhelmina (Belanda) memiliki peristirahatan khusus di kawasan Palalargon.

Indah memang, julukan itu, daerah yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi gunung ini memiliki banyak potensi wisata. Mulai dari kesenian, kuliner, budaya, industri, hingga keindahan alamnya. Tidak hanya itu, Garut juga kaya dengan hasil alamnya mulai dari tambang, mineral, hingga panas bumi

Potensi Sektor Industri Garut Garut kini berusia 204 tahun. Terus berbenah dan

berbenah. Berpenduduk 2.526.186 (berdasarkan Garut Dalam Angka 2015) dengan luas wilayah mencapai 3.065,29 km<sup>2</sup> ini, secara administratif wilayahnya terbagi menjadi 42 kecamatan yang meliputi 21 kelurahan dan 421 desa. Daerah yang dianugerahi kesuburan tanah, keanekaragaman flora dan fauna serta keindahan alamnya ini memiliki potensi dan peluang investasi yang cukup prospektif untuk digali dan dikembangkan.

Memang tidak sekadar bangga dengan potensi yang dimiliki; keseriusan dan kerja keras adalah modal berharga bagi pemerintah serta segenap komponen masyarakat dalam membangun daerah.

Lihatlah bagaimana ketersediaan lahan yang luas menjadikan Kabupaten Garut sebagai daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan agribisnis dan agroindustri. Beberapa komoditas pertanian yang dihasilkan meliputi tanaman pangan, buah-buahan, dan sayuran. Sedangkan, peluang investasi yang ditawarkan adalah pengembangan budi daya jagung. Demikian juga di sektor peternakan, wilayah Garut merupakan sentra produksi peternakan antara lain potensi hewan ternak yang cukup tinggi seperti penggemukan sapi potong dan budi daya domba garut.

Di wilayah ini pula terdapat aset perkebunan rakyat dan perkebunan besar antara lain akar wangi, kopi, teh, tembakau, kelapa sawit, dan kakao yang merupakan peluang sektor perkebunan yang cukup potensial. Kondisi ini ditunjang oleh luas hutan mencapai 96.304,97 ha hutan definitif terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung, dengan jenis





kayu yang dihasilkan kayu jati, kayu primus, dan kayu rimba campuran.

Sektor industri Kabupaten Garut memiliki potensi sumber daya alam yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai penunjang utama sektor industri terutama agroindustri,

antara lain industri akar wangi, minyak cengkeh, sutera alam, dodol, dan anyaman bambu. Selain itu, di wilayah Garut juga terdapat potensi industri penyamakan

kulit yang merupakan sentra terbesar di Indonesia, yaitu daerah Sukaregang. Sentra ini memasok kebutuhan bahan baku kulit tersamak untuk sentra-sentra industri lainnya yang mengolah menjadi aneka produk jadi, baik di daerah Garut maupun luar daerah, seperti sentra sepatu Cibaduyut.

Kabupaten Garut juga memiliki potensi industri yang cukup dikenal di tingkat nasional, yaitu industri Batik Tulis Garutan dan Sutera Alam. Kedua komoditas tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sedangkan, peluang investasi yang ditawarkan adalah pengolahan minyak akar wangi yang didukung ketersediaan lahan milik penduduk/petani, pengembangan Batik Garutan dan pengembangan Kain Sutera Alam. Demikian pula industri makanan ringan Dodol Garut menawarkan pesona tersendiri bagi para pengunjung yang bertandang ke

### CAPAIAN KOMPONEN IPM TAHUN 2010-2015

No	Komponen IPM	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	<b>IPM</b>	<b>60,23</b>	<b>60,55</b>	<b>61,04</b>	<b>61,67</b>	<b>62,23</b>	<b>63,21</b>
<b>I</b>	<b>Indeks Kesehatan</b>	<b>77,44</b>	<b>77,52</b>	<b>77,58</b>	<b>77,64</b>	<b>77,67</b>	<b>77,98</b>
	<b>AHH (Tahun)</b>	<b>70,34</b>	<b>70,39</b>	<b>70,43</b>	<b>70,47</b>	<b>70,49</b>	<b>70,69</b>
<b>II</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>51,03</b>	<b>51,59</b>	<b>52,63</b>	<b>53,67</b>	<b>55,06</b>	<b>55,16</b>
	<b>Indeks EYS (Harapan Lama Sekolah)</b>	<b>57,54</b>	<b>58,47</b>	<b>60,25</b>	<b>62,04</b>	<b>64,54</b>	<b>64,72</b>
	<b>EYS (Tahun)</b>	<b>10,36</b>	<b>10,52</b>	<b>10,85</b>	<b>11,17</b>	<b>11,62</b>	<b>11,65</b>
	<b>Indeks MYS (Rata-Rata Lama Sekolah)</b>	<b>44,52</b>	<b>44,71</b>	<b>45,01</b>	<b>45,30</b>	<b>45,57</b>	<b>45,60</b>
	<b>MYS (Tahun)</b>	<b>6,68</b>	<b>6,71</b>	<b>6,75</b>	<b>6,80</b>	<b>6,83</b>	<b>6,84</b>
<b>III</b>	<b>Indeks Pengeluaran</b>	<b>55,28</b>	<b>55,51</b>	<b>55,69</b>	<b>56,28</b>	<b>56,37</b>	<b>58,69</b>
	<b>Pengeluaran (Ribu Rupiah)</b>	<b>6.150</b>	<b>6.195</b>	<b>6.233</b>	<b>6.355</b>	<b>6.372</b>	<b>6.875</b>

Sumber : Bappeda Kab. Garut

## PERBANDINGAN CAPAIAN IPM TAHUN 2010-2015

No	IPM	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	<b>GARUT</b>	60,23	60,55	61,04	61,67	62,23	63,21
	<b>JAWA BARAT</b>	66,15	66,67	67,32	68,25	68,80	69,50
	<b>INDONESIA</b>	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55
	<i>Pertumbuhan IPM Garut (%)</i>		0,54	0,81	1,03	0,92	1,57
	<i>Pertumbuhan IPM Jawa Barat (%)</i>		0,79	0,97	1,39	0,80	1,02
	<i>Pertumbuhan IPM Nasional (%)</i>		0,84	0,91	0,90	0,86	0,94
	<i>Peringkat IPM di Jawa Barat</i>	24	25	25	27	26	25
	<i>Selisih dari Jawa Barat (poin)</i>	-5,92	-6,12	-6,28	-6,58	-6,57	-6,29
	<i>Selisih dari Nasional (poin)</i>	-6,30	-6,54	-6,66	-6,64	-6,67	-6,34

Sumber : Bappeda Kab. Garut

Garut.

Pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi tersebut tentunya akan memberikan kontribusi nyata bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut serta menjadi penyumbang bagi pendapatan masyarakatnya jika mendapat dukungan konkret dari berbagai stakeholder.

Bupati Garut, Rudi Gunawan sadar akan potensi besar yang dimiliki oleh kabupaten yang dipimpinnya saat ini. Beliau juga sadar betul, bahwa untuk meningkatkan derajatnya Garut harus melalui langkah awal yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar.

Berbagai treatment pun dilakukan, dengan komitmen untuk bisa mengentaskan kemiskinan dengan kewenangannya melalui politik anggaran dan berbagai regulasi. Komitmen itu bukan hanya

berlaku untuk dirinya dan aparaturnya pemerintahan Kabupaten Garut saja, namun keterlibatan masyarakat untuk keluar dari

“  
Salah satu prioritas pembangunan infrastruktur, dengan meningkatkan infrastruktur kesehatan. Buktinya, anggaran kesehatan kini mencapai 20 persen dari total APBD Kabupaten Garut

kemiskinannya sendiri harus terus didorong. Hasilnya, sejak Tahun 2015, Kabupaten Garut terlepas dari daerah tertinggal. Dengan komitmen bersama tersebut, program-program yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Pemerintah Propinsi Jawa

Barat dan Pemerintah Pusat ini menjadi bagian untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.

### Capaian IPM

Pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi tersebut tentunya akan memberikan kontribusi nyata bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut serta menjadi penyumbang bagi pendapatan masyarakatnya jika mendapat dukungan konkret dari berbagai stakeholder. Meski demikian, bila menengok capaian IPM, Garut masih terpaut 6,29 point dari rata-rata Jawa Barat atau 6,34 rata-rata nasional, walaupun bila melihat perbandingan capaian IPM Tahun 2010 hingga 2015 mengalami peningkatan. Tahun 2010 IPM Garut hanya 60,23, tahun 2011 (naik 0,54 %), tahun 2012 61,04



dr. H. Helmi Budiman

(naik 0,81%), tahun 2013 61,67 (naik 1,03), tahun 2014 62,23 (naik 0,92 %) dan tahun 2015 sebesar 63,21 atau naik 1,57 poin. Kenyataan ini mendudukkan Garut di peringkat 25 atau naik satu level dari tahun 2014. Sektor pendidikan selama ini selalu menjadi penyumbang terbesar nilai IPM Kabupaten Garut. Sedangkan IPM bidang kesehatan masih rendah dibawah rata-rata Jawa Barat

Menurut Bupati Rudy Gunawan salah satu masalah rendahnya IPM itu karena indeks kesehatan yang masih rendah. Disadari betul, IPM masih merupakan pekerjaan rumah besar bagi dirinya dan wakil bupati Helmi Budiman sebagai ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Untuk itu salah satu prioritas pembangunan infrastruktur, dengan meningkatkan infrastruktur kesehatan. Buktinya, anggaran kesehatan kini mencapai 20

persen dari total APBD Kabupaten Garut.

"Besarnya anggaran ini tentunya harus diikuti dengan hasil kerja maksimal dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH)", tegas Rudy saat memberikan pengarahan kepada jajaran kesehatan, termasuk para kepala puskesmas beberapa waktu lalu.

Dirinya bersama Wakil Bupati Helmi Budiman, optimis Pada tahun 2019 dengan pertumbuhan IPM sebesar 1,57 %, pencapaian IPM Garut mendatang bisa melampaui rata-rata IPM Jawa Barat. Karenanya, ia mengingatkan para jajarannya untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. "Bila angka kematian bayi masih tinggi jangan harap duduk jadi pejabat disini", tegasnya.

Wakil Bupati dr. Helmi Budiman menyatakan dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa lebih, idealnya Kabupaten Garut harusnya mempunyai 2.600

tempat tidur untuk rawat inap. Sedangkan saat ini, total jumlah tempat tidur yang sudah dimiliki baru sekitar 1.600 tempat tidur. Jumlah tersebut terdiri dari Rumah Sakit pemerintah dan swasta serta Puskesmas dengan tempat perawatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Garut. "Saat ini, jumlah tempat tidur untuk rawat inap yang kita miliki baru sekitar 1.600, padahal idealnya kita harus punya 2.600 tempat tidur, sehingga masih butuh 1.000 tempat tidur lagi. Ini berdasarkan asumsi jumlah penduduk Garut sebesar 2,6 juta jiwa. Maka tidak heran kalau masih sering kita lihat pasien di rumah sakit yang terlambat mendapatkan tempat ketika mau rawat inap", ungkap Helmi.

Untuk mengejar target jumlah tempat perawatan di Kabupaten Garut, Pemkab Garut rencananya akan membangun rumah sakit baru di wilayah Garut Selatan, yaitu Bungbulang dan Rancabuaya, serta di utara yakni di Limbangan dan Malangbong. Hingga 2016 sudah ada Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan). Tahun 2017 terdapat 4 puskesmas yang telah dioperasionalkan untuk pelayanan, yakni : Puskesmas Samarang, Sukarame (kecamatan Caringin), Cisompet dan Puskesmas Leuwigoong, Tahun 2018 diharapkan keempatnya bersama Puskesmas kadungora dapat ditingkatkan menjadi Puskesmas DTP.

### Program Garut Amazing

Sejak tahun 2015 kabupaten Garut telah keluar dari statusnya sebagai Daerah Tertinggal. Dari prosesnya, RPJMD Garut sudah diuji. Tahun 2015, Garut menjadi

juara kedua Anugerah Pangripta Nusantara tingkat propinsi Jawa Barat – sebuah penghargaan untuk perencanaan pembangunan. Dan ditahun 2016 meningkat menjadi juara kesatu.

RPJMD Garut kemudian menjadi terkenal Program Amazing-nya, maka tidak heran setiap program kerjanya tidak luput dari Amazing-nya. Tampaknya ptogram ini bukan main-main, dari total APBD Garut sebesar Rp 3,2 Triliun, 40 persennya digunakan untuk perbaikan infrastruktur. Melalui program amazingnya, Bupati berambisi mengangkat Garut dari ketertinggalan. APBD Garut sendiri lebih difokuskan terhadap program tiga pilar kepemimpinan Bupati Rudy Gunawan dan Wakilnya dr. Helmy Budiman. Tiga pilar tersebut meliputi meningkatkan indeks kepuasan masyarakat meliputi pembangunan jalan-jalan baru, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekarang Pemerintah Daerah beserta DPRD dan seluruh Masyarakat bertekad untuk membuat terobosan-terobosan sebagai sebuah inovasi, salah satunya pembangunan

infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur jalan tersebut dilaksanakan untuk memperlancar mobilitas transportasi produktivitas barang produksi serta sumber produksi lainnya guna menunjang peningkatan

**“Sekarang Pemerintah Daerah beserta DPRD dan seluruh Masyarakat bertekad untuk membuat terobosan-terobosan sebagai sebuah inovasi, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur jalan tersebut dilaksanakan untuk memperlancar mobilitas transportasi produktivitas barang produksi serta sumber produksi lainnya guna menunjang peningkatan denyut urat nadi perekonomian daerah**

denyut urat nadi perekonomian daerah.

Kondisi jalan dinilai mantap di Kabupaten Garut saat ini sudah mencapai sepanjang 580,3 kilometer (km) atau mencapai 80 persen dari total jalan kabupaten sepanjang 829 km dengan sisa berkondisi tak mantap sepanjang 248,7 km. Bupati Rudy mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan tersebut, merupakan lanjutan program 2016 digulirkannya sebagai tahun optimalisasi infrastruktur daerah dengan titik berat peningkatan infrastruktur di seluruh wilayah yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut 2016, atau populer disebut program “Garut Amazing”. “Prioritas penanganan infrastruktur jalan, jembatan, dan pembangunan jaringan jalan baru ini bakal berlanjut pada tahun anggaran berikutnya di 2018,” ujarnya,

la menyebutkan, prioritas pembangunan lainnya pada 2017 yakni penguatan sektor perekonomian masyarakat khususnya pada bidang pertanian atau agribisnis. Disusul pembangunan sektor pariwisata diarahkan menjadi pemicu atau faktor pendorong ketertarikan kunjungan guna dijadikan peluang pengembangan produk industri kreatif masyarakat.

Guna mendukung perekonomian masyarakat, salah satu yang kini menjadi pekerjaan besarnya adalah merevitalisasi pasar di beberapa kecamatan. Pemerintah Kabupaten Garut, pada tahun 2016 melakukan revitalisasi pasar tradisional, salah satunya pembangunan pasar tradisional Wanaraja, Kecamatan Wanaraja. Anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp26





Miliar, yang bersumber dari APBD Garut Tahun 2016.

Pembangunan Pasar Wanaraja merupakan program pemerintah. Kondisi bangunan pasarnya sudah tidak layak lagi, dibandingkan dengan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Garut.

"Ini juga merupakan salah satu langkah untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi setiap harinya," kata Bupati Rudy saat meninjau pembangunan Pasar Wanaraja beberapa waktu lalu.

Dalam peninjauan ini, orang nomor satu di Kota Intan ini bertemu dengan para pengelola pasar dan mereka merasa bahagia karena Pasar Wanaraja akan selesai pembangunannya dalam waktu dekat ini. Nantinya warga pasar yang saat ini berjualan akan mendapatkan kios secara gratis dan hanya dikenakan sewa dalam setiap tahunnya. Soalnya dalam pembangunannya dibiayai oleh pihak pemerintah tidak bersifat investasi pihak ketiga.

"Pemberlakuan ini berlaku bagi para pedagang yang sudah lama berjualan. Hal ini merupakan prioritas utama bagi para pedagang," imbuhnya.

Di Kabupaten Garut sendiri, akan dilakukan revitalisasi pasar

di berbagai tempat. Hal ini dilakukan agar para pedagang bisa bersaing. Apalagi saat ini pemerintah pusat tengah menggulirkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Jika tidak mulai dilakukan pembenahan dan penataan, kita tidak bisa bersaing disaat pasar global berlaku.

RPJMD Garut 2014-2019 benar-benar menentukan masa depan Garut, karena bila gagal maka masa depan Garut akan sulit untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang sudah maju terlebih dahulu. Program Amazing Garut akan menjawab semua itu.

Dengan bekal program Amazing ini pula, Kabupaten Garut akhirnya meraih opini WTP (Wajar tanpa Pengecualian) sebuah penghargaan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015. Bagi Pemerintah Kabupaten Garut raih prestasi tersebut merupakan pertama kalinya sejak 2004. Dan dibawah Rudy Gunawan dan Helmi Budiman raih opini WTP ini merupakan prestasi ditahun pertama kepemimpinannya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Garut.

Sebelumnya Kabupaten Garut hanya meraih opini tertingg yakni Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bupati Garut Rudy Gunawan menyebutkan, diraihnya predikat WTP dari BPK yang untuk pertama kalinya ini harus dijadikan momentum dan titik awal bagi Pemerintah Kabupaten Garut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah lebih baik lagi dan sesuai aturan berlaku.

Menurut bupati, kewajaran itu bukan kesempurnaan, artinya masih banyak yang harus diperbaiki. Diraihnya WTP hanya sebatas meningkatkan kepercayaan diri. Yang lebih utama akuntabilitas raih prestasi harus diikuti dengan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Garut meraih opini WTP tersebut, menurut Rudy, merupakan kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta dukungan dan komitmen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan tentunya dorongan serta harapan seluruh masyarakat Kabupaten Garut.

Banyak persyaratan yang harus





dipenuhi dan diperhatikan bagi suatu Pemerintah Daerah untuk mendapatkan WTP. Adanya satu itikad memperbaiki diri dan tekad bersama untuk membangun daerah menjadi salah satu kekuatan Pemerintah Kabupaten Garut dalam meraih prestasi tersebut.

Dinyatakannya Kabupaten Garut sebagai salah satu daerah yang memperoleh penilaian opini WTP, disebabkan salah satunya adalah laporan keuangan tahun 2015 tersebut, mendapatkan apresiasi dari DPRD Kabupaten Garut. Dadang Sudrajat, Anggota DPRD Garut, Fraksi Demokrat Restorasi adalah salah seorang yang memberikan apresiasi atas laporan dimaksud.

Menurutnya, ini sebuah prestasi yang baik bagi pemerintah Kabupaten Garut, yang dipimpin Rudy Gunawan-Helmi Budiman. Yang mana baru kali ini mendapatkan prestasi Opini WTP. "Kita harus akui ini keberhasilan Bupati Garut dalam menyajikan laporan keuangan," ungkapnya.

Bupati berharap agar seluruh kepala SKPD untuk terus dapat meningkatkan lagi penyelenggaraan APBD 2016 dengan lebih baik lagi. "Kita jangan terlena dengan prestasi hari ini", tegasnya.

Dalam suatu Apel Pagi Gabungan di Lingkungan Pemkab Garut, beberapa waktu lalu, Rudy Gunawan mengingatkan jajarannya untuk terus bekerja keras, agar komitmen dan janji dirinya menjadikan Garut Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera dapat terwujud. Komitmen dan janji bupati dan wakil bupati itu telah dituangkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2014. Banyak pekerjaan yang hingga kini harus mendapat perhatiannya, termasuk meningkatkan IPM di bidang kesehatan yang saat ini masih dibawah rata-rata Jawa Barat.

“**Harapan 204 tahun Kabupaten Garut adalah masa keemasan yang ingin diraih. Raihan yang membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama. Bukan tidak mungkin Tahun 2017 sebagai tahun politik menjadi jawaban dari harapan masyarakat. Artinya akan diukur oleh tingkat kepuasan masyarakat.**”

Kegiatan-kegiatan pembangunan ini pada gilirannya diharapkan bisa menanggulangi persoalan-persoalan kemiskinan, kesenjangan, serta pengangguran di Kabupaten Garut.

Harapan 204 tahun Kabupaten Garut adalah masa keemasan yang ingin diraih. Raihan yang

membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama. Bukan tidak mungkin Tahun 2017 sebagai tahun politik menjadi jawaban dari harapan masyarakat. Artinya akan diukur oleh tingkat kepuasan masyarakat.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan jika untuk persentase harapan dan kepercayaan warga Garut terhadap pemerintahan di bawah kepemimpinannya saat ini masih bertengger di angka 75 persen. Dengan demikian, dia menyatakan ingin segera mewujudkan perbaikan infrastruktur terutama jalan agar tingkat kepuasan meningkat.

“Ya, kalau jalan sudah berhasil dibangun semuanya akan meningkat, baik kepuasan, harapan maupun kepercayaan,” ungkapnya.

Maka bukan hanya slogan 204 tahun Kabupaten Garut adalah saatnya Mapag Abad Kadigjayan. (\*)





## PRESTASI KABUPATEN GARUT TAHUN 2016



Berikut adalah prestasi yang diraih Pemda Garut dan duta-duta membanggakan Kabupaten Garut di tahun 2016 :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Anugerah Pangripta Nusantara terbaik I Tingkat Provinsi Jawa Barat di bidang perencanaan pembangunan dan Nominator Tingkat Nasional bersama 16 kabupaten/kota lain di Indonesia;
3. Anugerah Manggala Karya Kencana;
4. Penghargaan Kecamatan Terbaik Tahun 2016 Peringkat I Kategori Wilayah Kabupaten Tingkat Jawa Barat a.n.Kecamatan Garut Kota;
5. Juara Pertama Lomba Bulan Bakti Gotong Royong tingkat Jawa Barat a.n. Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang;
6. Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan kategori prestasi sangat tinggi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
7. Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat Se Jawa Barat;
8. Investment Award (Nominasi penyelenggara PTSP Kabupaten Terbaik) Tahun 2016 dari BKPM RI;
9. Penghargaan dari Ombudsman dalam kepatuhan pelayanan publik;
10. Penghargaan Een Sukaesih Award 2016 dari Gubernur Jawa Barat sebagai Kepala Daerah Peduli Pendidikan Kreatif dan Inovatif di Jawa Barat;
11. Award dari LAN RI sebagai Kabupaten yang konsisten melaksanakan inovasi;
12. Penghargaan Pameran Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Garut hasil fasilitasi laboratorium inovasi PKP2A I LAN Tahun 2016;
13. Penghargaan Sebagai Kabupaten Peduli HAM Tahun 2016 dari Menteri Hukum dan HAM;
14. Pemenang harapan pada Penghargaan Kepegawaian BAIK Tingkat Pengelola Kepegawaian Kabupaten/ Kota Se- Jawa Barat Kluster I Tahun 2016;
15. Kabupaten Garut sebagai Kota Penerima Sertifikat Adipura Tahun 2016 daerah Jawa Barat;
16. Penghargaan Adiwiyata Mandiri daerah Jawa Barat Tahun 2016 di bidang lingkungan hidup a.n. SMAN 1 Garut;
17. Juara I Nasional Gelar Produk Usaha Bersama Komunitas (UBK) a.n. Kecamatan Selaawi;
18. Penghargaan predikat best of the best tingkat nasional Bumdes bersama a.n. Kecamatan Leles;
19. Juara III lomba PKP (Pendamping Kader Posyandu) Kecamatan tingkat Provinsi Jawa Barat a.n. Kecamatan Garut Kota;
20. Juara I pegawai teladan tingkat Provinsi Jawa Barat untuk kategori JFT a.n. Ibu Atin, guru SMP 2 Garut;
21. Juara III lomba sapi potong Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 a.n. Kelompok Harapan Petani Kp. Jumre Desa Caringin Kecamatan Karangtengah;
22. Juara III tingkat nasional untuk kategori daerah terpencil, a.n. Puskesmas Cisewu.
23. Satya Karya Kencana (Penghargaan Kepada Bupati/ Kepala Daerah Dalam Rangka Mendukung Program KB)
24. Juara pertama Tingkat Provinsi Lomba Kader BKR (Bina Keluarga Remaja) a.n. Rizal
25. Juara tiga tingkat Nasional Lomba Kader BKR a.n. Rizal
26. Juara kedua lomba BKB (Bina Keluarga Balita) Tingkat Provinsi Jabar a.n. Kelompok Flamboyan Kel. Paminggir Kec. Garut Kota

27. Juara kedua Lomba BKL (Bina Keluarga Lansia) a.n. kelompok Nusa Indah Kel. Paminggir Kec. Garut Kota
28. Juara Motivator KB Pria a.n. Hadin
29. Juara kedua tingkat Provinsi Jawa Barat Kelompok Paguyuban KB Pria a.n. Apud Kec. Pakenjeng
30. Juara Pengelola Kelompok KB Pria a.n. Aam Mihar Kec. Cisewu
31. Duta Anak mewakili Provinsi Jawa Barat ke Tingkat Nasional di Mataram a.n. Yanti Muthmainah
32. Juara kedua tingkat Provinsi Jawa Barat Lomba TPD a.n. Sri Puji Lestari
33. Juara I Kelompok Tani Peternak Sapi Potong Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2015 diraih oleh Kelompok Tani Santani Desa Selaawi Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut.
34. Juara I Kelompok Tani Hutan Rakyat Tingkat Provinsi Jawa Barat diraih oleh Kelompok Tani Mitra Sawargi Desa Mekar Raya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut
35. Juara I Kelompok Usaha Bersama Mina Padi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 diraih oleh Ade Mulyadi Desa Karangari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
36. Juaran I Anugrah Prakarsa Tingkat Provinsi Jawa Barat sebagai Pelopor Pemuda Tani Pertanian Ramah Lingkungan diraih oleh Bapak Sopian Desa Sindangprabu Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut
37. Juara III Penyuluh Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat diraih oleh Lia Indria Perdani, SST. dari BP3K Bayongbong
38. Juara ke tiga Tangguh Award tahun 2015 untuk karya tulis jurnalistik bidang kebencanaan
39. Juara I Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, diwakili Desa Cikandang Kec. Cikajang dan akan mewakili Provinsi Jabar ke Tk Nasional pd tahun 2017 , mengingat pada Tahun 2016 untuk lomba Tk. Nasional ditanggihkan.
40. Juara I Lomba Kemasan Produk Usaha Bersama (UBK) Tingkat Nasional bidang kemasan produk anyaman bambu pada acara UBK Expo di pulau Bali Tahun 2016. Diwakili oleh UBK Desa Selaawi.
41. Investment Award dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik Tahun 2016;
42. SKPD dengan nilai tertinggi di Kabupaten Garut tahun 2016 berdasarkan penilaian Komisi Ombudsmen dalam penilaian kepatuhan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan komponen standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
43. Lomba puskesmas berprestasi di tingkat nasional yang diwakili oleh Puskesmas Cisewu dan mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan.
44. Roni (TBM AIUEO) Lomba Pengelola TBM Tingkat Provinsi
45. Endah (SKB) Lomba Pamong Tingkat Provinsi
46. Yuyus S. (Syfhaushshudur) Lomba Tutor Tingkat Provinsi
47. Drs. H Aen Karnae (LKP Journal) Lomba Kinerja Tingkat Provinsi
48. Didi Atmadja (LKP CMI) Lomba Kinerja Tingkat Provinsi
49. Seksi Kelembagaan dan Kursus Dinas Pendidikan pada Lomba Pameran Kursus Tingkat Provinsi
50. Hasna Nasratunnadwah (SMPN 1 TARKAL) peringkat 1 FLS2N Tingkat Provinsi
51. Andre(SMPN 4 GARUT) peringkat 1 O2SN Tingkat Provinsi
52. Andre(SMPN 4 GARUT) peringkat 1 O2SN Tingkat Nasional
53. PASKIBRA SMKN 2 GARUT Tingkat Provinsi
54. Dinas perhubungan Kabupaten Garut pada tahun 2016 kembali mendapat Plakat Wahana Tata Nugraha dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan.
55. KPGS Cikajang Juara ke 1 Koperasi Berprestasi Jenis Sektor Riil Tahun 2016Tingkat Propinsi Jawa Barat
56. H. Uun Djuhana Sutardiwidjaja (Ketua Primer Koperasi Wredatama /Primkoptama) Waluya Kec. Cikajang mendapatkan Penghargaan Jasa Bakti Koperasi dan UKM RI Tingkat Nasional
57. Juara Harapan I Sekolah Pantai Indonesia Tingkat Nasional, diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
58. Juara I Adibhakti Mina Bahari Bidang Perikanan Tangkap Tingkat Provinsi Jawa Barat kategori KUB Perikanan Tangkap Teladan I (an. KUB Mandiri, Kp. Cibueuk RT 01 RW 08 Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kabupaten Garut);
59. Juara III Lomba Kelompok Pengamanan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (POKMASWAS) Tingkat Provinsi Jawa Barat Kategori Bidang Pelestarian Sumberdaya Perikanan (an. Kelompok Pokmaswas Binawangi Kp. Rancabolang RT 03 RW 07 Desa Karangwangi Kecamatan Mekarmukti).
60. Juara 2 Lomba Petugas Berprestasi Tingkat Nasional Kementerian Pertanian RI kategori Petugas Inseminator Berprestasi

(a.n. Mauludin Albani, S.Pt, ULIB Kecamatan Bungbulang);

61. Juara 1 Kontes Ternak Tingkat Nasional Piala Kemerdekaan RI di Istana Bogor kategori Ratu Bibit Domba Garut (an. Mohammad Komaludin, Ds. Salam Nunggal Kec. Leles);
62. Kelompok Terbaik Pengembangan Peternakan Sapi Perah Tingkat Jawa Barat (an. Kelompok Bebedahan, Desa Ciburuy, Bayongbong);
63. Kelompok Terbaik Pengembangan Peternakan Domba Garut Tingkat Jawa Barat (an. Kelompok Ramasakti, Kp. Cihampelas Ds. Mekarjaya, Tarogong Kaler);
64. Juara 2 Kelompok Agribisnis Peternakan Kategori Sapi Perah Tingkat Jawa Barat (an. Kelompok Pamegatang, Kampung Tanggung Renteng, Ds. Mekarjaya, Kec. Cikajang);
65. Juara 1 Kontes Ternak Tingkat Jawa Barat kategori Ratu Bibit Domba Garut (an. Mohammad Komaludin, Ds. Salam Nunggal Kec. Leles);
66. Juara 1 Kontes Ternak Tingkat Jawa Barat kategori Sapi Pasundan Jantan (an. Arif Rahman, Mekarwangi Kec. Sukawening);
67. Juara 1 Kontes Ternak Tingkat Jawa Barat kategori Sapi Perah Dara Umur 15 bulan (an. Mamad, Ds. Barusuda, Kec. Cigedug);
68. Juara 2 Kontes Ternak Tingkat Jawa Barat kategori Domba Garut Ratu Bibit (an. Aceng Kurnia Ds. Sukamenteri, Kec. Garut Kota);
69. Juara 2 Kontes Ternak Tingkat Jawa Barat kategori Sapi Perah Laktasi 2 (an. Jaah, Ds. Cipangramatan, Kec. Cikajang);
70. Juara 2 Kontes Ternak Tingkat Jawa Barat kategori Ayam Pelung (an. Iman, Ds. Panembong Kec. Bayongbong);
71. Juara 3 Kontes Ternak Tingkat Jawa Barat kategori Ayam Pelung (an. Yadi, Ds. Sukarame Kec. Bayongbong);
72. Juara 3 Kontes Ternak Tingkat Jawa Barat kategori Sapi Potong PO Jantan (a.n. Iwa Kartiwa, Ds. Caringin Kec. Karangtengah);
73. Juara 3 Kontes Ternak Tingkat Jawa Barat kategori Ratu Bibit Domba Garut (a.n. Ibnu Salim Ds. Salamnunggal Kec. Leles).
74. Lomba Desain Kemasan Produk Olahan Berbahan baku Lokal kategori IKM Juara II Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan baku Lokal Jawa Barat " Diverifikasi Produk Olahan Berbasis Daging dan Susu"
75. Abdul Rohman CS SMA Ciledug cabang olah raga Bola Voli Indoor Peraih Medali Emas Nomor Beregu Putra Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR
76. Andika Dhanireksa SMAN 6 GARUT cabang olah raga Pencak Silat Peraih 2 Medali Emas Kategori Tunggal dan Beregu Putra Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR
77. Desvy Rahma Putri Mahendra SMPN 1 CIKAJANG Peraih Medali Emas Kategori Tunggal Putri Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR
78. Kresna Banyu SMPN 2 Tarogong Kidul cabang olah raga Pencak Silat Peraih Medali Emas Kategori Beregu Putra Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR
79. Rano Slamet Nugraha MTS PERSIS Tarogong cabang olah raga Pencak Silat Peraih Medali Emas Kategori Beregu Putra Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR
80. Okeu Oktaviana SMAN 15 Garut cabang olah raga Pencak Silat Peraih Medali Emas Kategori Beregu Putri Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR
81. Risma Nurhayati SMP Fauzaniyah cabang olah raga Pencak Silat Peraih Medali Emas Kategori Beregu Putri Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR
82. Tammy Meidina SMAN 6 GARUT cabang olah raga Pencak Silat Peraih Medali Emas Kategori Beregu Putri Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR
83. Lutfi Lukmanul Hakim SMKN 12 Garut cabang olah raga Pencak Silat Peraih Medali Perak Kategori Ganda Putra Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR
84. Hazkia Yunaira SMPN 2 Garut cabang olah raga Renang Peraih 3 Medali Emas Kategori 50 m, 100 m dan 200 m Gaya Punggung Putri Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR
85. Alwan Naoval Haidar SMAN 11 GARUT cabang olah raga Peraih 2 Medali Perak Kategori 50 m gaya punggung dan 200 m gaya dada putra Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR
86. Ainun Kuswandi SMAN 6 GARUT cabang olah raga Tarung Derajat Peraih Medali Emas Kelas 43 - 46 Kg Putri Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR



87. Sri Wahyuni SMAN 18 GARUT cabang olah raga Tarung Derajat Peraih Medali Perunggu Kelas 41 -43 Kg Putri Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR

88. Natasya Nurpramita SMAN 11 GARUT Tae Kwon Do Peraih Medali Perak Kelas Under 46 Kg Putri Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR

89. Ratu Agustiar SMPN 5 GARUT cabang olah raga Peraih Medali Perunggu Kelas Under 42 Kg Putri Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR

90. Andre Kristian Gunaya Cs SMPN 4 Garut cabang olah raga Tenis Meja Peraih Medali Perak Kategori Beregu Putra Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR



91. Ihsan Rizky Fauzi MA Fauzaniyah cabang olah raga Senam Peraih Medali Perak Kategori Perorangan Putra Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR

92. Sopa SMKN 17 Garut cabang olah raga Gulat Peraih Medali Perunggu Kelas Gaya Bebas 46 Kg Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR

93. Sovia Maryam SMAN 2 Garut cabang olah raga Gulat Peraih Medali Perunggu Kelas Gaya Bebas 49 Kg Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR

94. Ririn Rianti Nazara MTs Darul Fallah Persis cabang olah raga Atletik Peraih Medali Perunggu Nomor Lari 2000 m Halang Rintang Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI JABAR

95. M. Azwin SMP IT Al Wasillah cabang olah raga Renang Peraih 3 Medali Emas Nomor 50 m gaya dada, 50 m & 100 m Gaya Bebas Putra Pada Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)

96. Gumilar Purnama MTs Ciledug cabang olah raga Renang Peraih Medali Perak Nomor 100 m Gaya Bebas Putra Pada Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)

97. Fadilah Aulia SMP IT Al Khoeriyah cabang olah raga Atletik Peraih 3 Medali Emas Nomor Lari 100 m, Lompat Jauh dan Tolak Peluru Pada Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)

98. Lutfi Yusuf SLB PUI Sukawening cabang olah raga Atletik Peraih Medali Perunggu Nomor Lari 400 m Putra Pada Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)

99. Sonia SLB Bayongbong cabang olah raga Atletik Peraih Medali Perunggu Nomor Lari 200 m Putri Pada Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)

100. Herdiansyah SMPN 1 Karangtengah cabang olah raga Catur Peraih Medali Emas Kategori Catur Standar Pada Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)

101. Sertifikat Adipura atas Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Kabupaten Tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

102. Penghargaan Adiwiyata Mandiri untuk SMAN I Garut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

103. Penghargaan Raksa Prasada untuk Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan Tahun 2016 oleh SMPN 2 Banyuwesmi, SMPN 2 Karangpawitan, SMPN 1 Sucinaraja, SMPN 2 Bayongbong dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

104. Penghargaan Raksa Prasada untuk Drs. Aang Suhana, M.Si dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

105. LPPD Kabupaten Garut merupakan LPPD Terbaik ke-2 Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2015.

106. Kelompok Tani Raksawana Agro Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat mendapat Piagam Penghargaan oleh Menteri Pertanian Berprestasi Tingkat Nasional di Bidang Tanaman Hortikultura (Mejadi agen penyebaran inovasi dan berkontribusi aktif membina anggota kelompok tani dalam pengembangan bibit kentang hasil Penelitian Balitbangtan untuk mengurangi ketergantungan bibit dan

107. Kelompok Tani Mekar Sari II Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat mendapat Piagam Penghargaan oleh Menteri Pertanian Berprestasi Tingkat Nasional di Bidang Pembangunan Pertanian (Komoditi Bawang Merah) dalam menyediakan stok bawang merah untuk menyukseskan program pemerintah operasi pasar dan menjaga stabilitas harga.



## Garut dalam Bingkai Sejarah

Roda zaman terus berputar hingga kini Kabupaten Garut menginjak usianya yang ke-204. Sebuah usia yang menunjukkan panjangnya perjalanan Kabupaten Garut sebagai sebuah daerah yang terus tumbuh dan berkembang. Rumah besar bagi lebih dari 2,5 juta jiwa penduduk di dalamnya dalam merajut kehidupan.

**P**enetapan Hari Jadi Garut pada tanggal 16 Februari merupakan keputusan bersama seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat Garut yang dituangkan dalam Perda Kabupaten Garut No. 30 Tahun 2011 tentang Hari Jadi Garut. Dengan segala pertimbangannya, penetapan tanggal 16 Februari sebagai Hari Jadi Garut dipandang lebih tepat dari tiga tanggal sebelumnya, yakni tanggal 17 Mei, kemudian tanggal 15 September dan selanjutnya tanggal 17 Maret.

Semua kalangan masyarakat Garut telah menerima bahwa Hari Jadi Garut bukan jatuh pada tanggal 17 Mei 1913 yaitu saat penggantian nama Kabupaten Limbangan menjadi Kabupaten

Garut, tetapi pada saat kawasan kota Garut mulai dibuka dan dibangun sarana prasarana sebagai persiapan ibukota Kabupaten Limbangan.

Oleh karena itu, mulai tahun 1963 Hari Jadi Garut diperingati setiap tanggal 15 September berdasarkan temuan Tim Pencari Fakta Sejarah yang mengacu tanggal 15 September 1813 tersebut pada tulisan yang tertera di jembatan Leuwidaun sebelum direnovasi. Namun, keyakinan masyarakat terhadap dasar pengambilan Hari Jadi Garut pun berubah. Hingga terakhir dinyatakan bahwa Hari Jadi Garut dipandang lebih tepat pada tanggal 16 Februari 1813.

Penelusuran Hari Jadi Garut berpijak pada pertanyaan kapan

pertama kali muncul istilah “Garut”. Seperti dijelaskan dalam Latar Belakang di atas, bahwa ungkapan itu muncul saat “ngabaladah” dalam mencari tempat untuk ibukota Kabupaten Limbangan yang diperintahkan R.A.A Adiwijaya sebagai Bupati yang dilantik pada tanggal 16 Februari 1813. Fakta tentang Jembatan Leuwidaun yang peletakan batu pertamanya adalah tanggal 15 September 1918 juga tetap diperhitungkan. Dengan demikian, asal mula teretus kata “Garut” adalah diyakini berada pada sebuah hari antara 16 Februari 1813 s.d. 15 September 1918.

Sejarah Kabupaten Garut berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada



**RAA Adiwijaya  
1813-1831**

tahun 1811 oleh Daendels dengan alasan produksi kopi dari daerah Limbangan menurun hingga titik paling rendah nol dan bupatinya menolak perintah menanam nila (indigo). Pada tanggal 16 Februari 1813, Letnan Gubernur di Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Raffles, telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan kembali Kabupaten Limbangan yang beribu kota di Suci. Untuk sebuah Kota Kabupaten, keberadaan Suci dinilai tidak memenuhi persyaratan sebab daerah tersebut kawasannya cukup sempit.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Limbangan Adipati Adiwijaya (1813-1831) membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok bagi Ibu Kota Kabupaten. Pada awalnya, panitia menemukan Cimurah, sekitar 3 Km sebelah Timur Suci (Saat ini kampung tersebut dikenal dengan nama Kampung Pidayeuheun). Akan tetapi di tempat tersebut air bersih sulit diperoleh sehingga tidak tepat menjadi Ibu Kota. Selanjutnya panitia mencari lokasi ke arah Barat Suci, sekitar 5 Km

dan mendapatkan tempat yang cocok untuk dijadikan Ibu Kota. Selain tanahnya subur, tempat tersebut memiliki mata air yang mengalir ke Sungai Cimanuk serta pemandangannya indah dikelilingi gunung, seperti Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Gunung Galunggung, Gunung Talaga Bodas dan Gunung Karacak.



**R. Adipati Aria Wiratanudatar  
1871-1915**

Saat ditemukan mata air berupa telaga kecil yang tertutup semak belukar berduri (Marantha), seorang panitia "kakarut" atau tergores tangannya sampai berdarah. Dalam rombongan panitia, turut pula seorang Eropa yang ikut membenahi atau "ngabaladah" tempat tersebut. Begitu melihat tangan salah seorang panitia tersebut berdarah, langsung bertanya : "Mengapa berdarah?" Orang yang tergores menjawab, tangannya kakarut. Orang Eropa atau Belanda tersebut menirukan kata kakarut dengan lidah yang tidak fasih sehingga sebutannya menjadi "gagarut".

Sejak saat itu, para pekerja

dalam rombongan panitia menamai tanaman berduri dengan sebutan "Ki Garut" dan telaganya dinamai "Ci Garut". (Lokasi telaga ini sekarang ditempati oleh bangunan SMP 1, SMP 2, dan SMP 4. Dengan ditemukannya Ci Garut, daerah sekitar itu dikenal dengan nama Garut. Cetusan nama Garut tersebut direstui oleh Bupati Kabupaten Limbangan Adipati Adiwijaya untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Limbangan.

Pada tanggal 15 September 1813 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan sarana



**RAA. Muh. Musa Suria Kertalegawa  
1929-1944**

dan prasarana ibukota, seperti tempat tinggal, pendopo, kantor asisten residen, mesjid, dan alun-alun. Di depan pendopo, antara alun-alun dengan pendopo terdapat "Babancong" tempat Bupati beserta pejabat pemerintahan lainnya menyampaikan pidato di depan publik. Setelah tempat-tempat tadi selesai dibangun, Ibu Kota Kabupaten Limbangan pindah dari Suci ke Garut sekitar Tahun 1821. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No: 60 tertanggal 7 Mei 1913, nama Kabupaten Limbangan diganti



menjadi Kabupaten Garut dan beribu kota Garut pada tanggal 1 Juli 1913. Pada waktu itu, Bupati yang sedang menjabat adalah RAA Wiratanudatar (1871-1915). Kota Garut pada saat itu meliputi tiga desa, yakni Desa Kota Kulon, Desa Kota Wetan, dan Desa Margawati. Kabupaten Garut meliputi Distrik-distrik Garut, Bayongbong, Cibatuh, Tarogong, Leles, Balubur Limbangan, Cikajang, Bungbulang dan Pameungpeuk.

Pada tahun 1915, RAA Wiratanudatar digantikan oleh keponakannya Adipati Suria Karta Legawa (1915-1929). Pada masa

pemerintahannya tepatnya tanggal 14 Agustus 1925, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal, Kabupaten Garut disahkan menjadi daerah pemerintahan yang berdiri sendiri (otonom). Wewenang yang bersifat otonom berhak dijalankan Kabupaten Garut dalam beberapa hal, yakni berhubungan dengan masalah pemeliharaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, kebersihan, dan poliklinik. Selama periode 1930-1942, Bupati yang menjabat di Kabupaten Garut adalah Adipati Moh. Musa Suria Kartalegawa. Ia diangkat menjadi Bupati Kabupaten Garut pada

tahun 1929 menggantikan ayahnya Adipati Suria Karta Legawa (1915-1929).

#### **Perkembangan Fisik Kota**

Sampai tahun 1960-an, perkembangan fisik Kota Garut dibagi menjadi tiga periode, yakni pertama (1813-1920) berkembang secara linear. Pada masa itu di Kota Garut banyak didirikan bangunan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk kepentingan pemerintahan, berinvestasi dalam usaha perkebunan, penggalian sumber mineral dan objek wisata. Pembangunan pemukiman



penduduk, terutama disekitar alun-alun dan memanjang ke arah Timur sepanjang jalan Societeit Straat.

Periode kedua (1920-1940), Kota Garut berkembang secara konsentris. Perubahan itu terjadi karena pada periode pertama diberikan proyek pelayanan bagi penduduk. Wajah tatakota mulai berubah dengan berdirinya beberapa fasilitas kota, seperti stasiun kereta api, kantor pos, apotek, sekolah, hotel, pertokoan (milik orang Cina, Jepang, India dan Eropa) serta pasar.

Periode ketiga (1940-1960-an), perkembangan Kota Garut cenderung mengikuti teori inti berganda. Perkembangan ini bisa dilihat pada zona-zona perdagangan, pendidikan, pemukiman dan pertumbuhan penduduk.

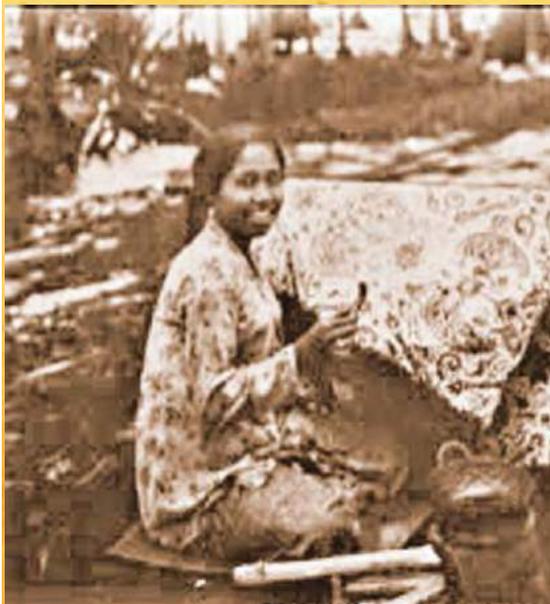
#### **Keadaan Umum Kota**

Pada awal abad ke-20, Kota Garut mengacu pada pola masyarakat yang heterogen sebagai akibat arus urbanisasi. Keanekaragaman masyarakat dan pertumbuhan Kota Garut erat kaitannya dengan usaha-usaha perkebunan dan objek wisata di daerah Garut.

Orang Belanda yang berjasa dalam pembangunan perkebunan dan pertanian di daerah Garut adalah K.F Holle. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah Kolonial Belanda mengabadikan nama Holle menjadi sebuah jalan di Kota Garut, yakni jalan Holle (Jl.Mandalagiri) dan membuat patung setengah dada Holle di Alun-alun Garut.

Pembukaan perkebunan-perkebunan tersebut diikuti pula dengan pembangunan hotel-hotel pada Tahun 1917. Hotel-hotel tersebut merupakan tempat menginap dan hiburan bagi para pegawai perkebunan atau wisatawan yang datang dari luar negeri. Hotel-hotel di Kota Garut , yaitu Hotel Papandayan, Hotel Villa Dolce, Hotel Belvedere, dan Hotel Van Hengel.

Di luar Kota Garut terdapat Hotel Ngamplang di Cilawu, Hotel Cisarupan di Cisarupan, Hotel Melayu di Tarogong, Hotel Bagendit di Banyuresmi, Hotel Kamojang di Samarang dan Hotel Cilauteureun di Pameungpeuk. Berita tentang Indahnya Kota Garut tersebar ke seluruh dunia, yang menjadikan Kota Garut sebagai tempat pariwisata.(\*)



# BUPATI GARUT

## *Dari Masa ke Masa*



**RAA Adiwijaya**  
1813-1831



**RAA Kusumadinata**  
1831-1833



**Tumenggung Jayadiningrat**  
1833-1871



**R. Adipati Aria Wiratanudatar**  
1871-1915



**RAA Soeria Kartalegawa**  
1915-1929



**RAA. Muh. Musa Suria Kertalegawa**  
1929-1944



**R. Tumenggung Endung Suriaputra**  
1944-1945



**R. Kalih Wiraatmadja**  
1945-1948



**R. Tumenggung Agus Padmanagara**  
1948-1949



**R. Tumenggung Kartahudaya**  
1949-1950



**R. Moh. Sabri Kartasomantri**  
1950-1956



**R. Moh. Noh Kartanegara**  
1956-1960



**R. Gahara Widjaja Suria**  
1960-1966



**Letkol Akil Ahyar Mansyur**  
1966-1967



**R.M. Bob Yacob Ishak**  
1967-1972



**Drs. R. Moh. Syamsudin**  
1972-1973



**Ir. Hasan Wirahadikusumah**  
1973-1978



**Letkol Iman Sulaeman**  
1978-1983



**Letkol Kav Taufik Hidayat**  
1983-1988



**Momon Gandasmita, SH**  
1988-1993



**Drs. H. Toharudin Gani**  
1993-1998



**Drs. H. Dede Satibi**  
1999-2004



**Agus Supriadi**  
2004-2009



**H. Aceng HM Fikri, S.Ag**  
2009-2013



**H. Agus Hamdani GS.S.Pd.I**  
Sisa Periode 2009-2014



**H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP**  
2014-Sekarang



dr. H. Helmi Budiman

## Bertahap Tuntaskan Janji Politik

Tepat tanggal 23 Januari 2017, tiga tahun yang lalu pasangan Bupati dan Wakil Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP. dan dr. H. Helmi Budiman dilantik dan diambil sumpahnya. Kini, hasil positif yang diraih selama tiga tahun itu merupakan buah kerjasama semua unsur.

**S**alah satu pencapaian membanggakan adalah peraihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan yang selama ini belum pernah diraih Pemda Garut. Hal ini merupakan bukti kerja keras semua jajarannya, tidak terkecuali mulai dari jabatan fungsional umum hingga pejabat struktural.

Di sela kesibukkan, Wakil Bupati Garut, dr. H. Helmi Budiman mengatakan, ada delapan janji politiknya yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Jadi ada delapan janji politik RUDY-HELMI yang disampaikan ketika kampanye, dan Alhamdulillah kedelapan janji

politik ini sudah menjadi perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ini sudah disepakati dan disetujui oleh seluruh anggota dewan maka menjadi RPJMD yang tentu RPJMD harus direalisasikan. Artinya, ketika kita merealisasikan RPJMD berarti di dalamnya sudah menghasilkan delapan janji politik, atau ketika kita ingin merealisasikan janji politik sebenarnya tinggal menjalankan RPJMD,” katanya.

Langkah berikutnya, menurut Helmi, RPJMD ini harus menjadi RKPD yang selain diperkaya delapan janji politik, juga diperkaya Musrenbang tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. “Tentu ini adalah merupakan bagian dari penyempurnaan janji politik yang delapan tadi”, katanya.

“  
Ketika kita merealisasikan RPJMD berarti di dalamnya sudah menghasilkan delapan janji politik, atau ketika kita ingin merealisasikan janji politik sebenarnya tinggal menjalankan RPJMD



Langkah-langkah yang dilakukan selain di perencanaan juga pelaksanaannya termasuk didalamnya evaluasi dan pengawasan agar delapan janji politik ini bisa direalisasikan. Sebagian janji politiknya memang sudah dilaksanakan, sedangkan yang belum, tahun 2017 ini diharapkan semua janji-janji politik itu bisa direalisasikan guna mencapai kesempurnaan secara bertahap.

Salah satu janji politiknya yang menjadi prioritas adalah gratis SPP bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA serta beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil. Artinya tidak boleh lagi ada pungutan ke sekolah-sekolah. Selain itu beasiswa yang rencananya akan diberikan pada tahun 2016 karena ada pemotongan DAU, akan dialihkan ke tahun 2017.

Janji yang lain adalah gratis berobat dan ambulance bagi keluarga miskin. Saat ini BPJS saja pencapaiannya sudah lebih

dari penduduk miskin yang segera diverifikasi agar setiap tahun tepat sasaran. “Jadi kalau misalkan sekarang ada yang jatuh miskin, maka tahun berikutnya kita verifikasi lagi”, jelasnya. Belum lagi untuk ambulan bagi warga miskin, dimana pada tahun ini lebih dari 30 unit, untuk menjamin masyarakat miskin memakai ambulan secara gratis, termasuk mobil jenazah sudah disiapkan.

Janji lainnya adalah membangun rumah tidak layak huni. Saat ini pihaknya telah mendapat bantuan dari provinsi, dimana hampir 5.000 KK telah dibangun rumah tidak layak huni.

Sedangkan, pemberian insentif bagi RW dan RT, guru honorer, Kader Posyandu dan guru ngaji adalah bagian janjinya yang harus teralisasi, termasuk bantuan usaha kelompok perempuan yang harus terealisasi tahun ini.

Untuk bidang infrastruktur yang juga bagian dari janji politiknya, dimana dalam janji kampanye dialokasikan sebesar Rp 300 milyar, namun kenyataannya mencapai lebih dari Rp 300 milyar. Helmi optimis hingga 2018 semua janji politik itu bisa terealisasi, dengan upaya kerja keras, termasuk IPM yang masih di bawah rata-rata Jawa Barat, dimana IPM kesehatan mendapatkan perhatian besar terutama dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

“Nah ini kita mendapatkan beberapa program tersebut salah satunya audit maternal perinatal. Kalau dulu tidak ada audit itu seolah-olah seperti meningkat. Mungkin itu dulu seperti itu tetapi akibat dari audit itu para petugas medis lebih semangat, lebih bertanggung jawab dan kita lihat hasilnya pada tahun 2017 ini”,

## PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2017

### PILAR PEMBANGUNAN 2017

- Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Sukses Pelayanan dan Pemerintahan Umum

### PRIORITAS JANJI KAMPANYE

- Gratis SPP bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA serta beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil;
- Gratis berobat dan ambulance bagi keluarga miskin;
- Pemberian insentif bagi RW dan RT, Guru Honorer, Kader Posyandu dan Guru Ngaji;
- 300 milyar untuk Pembangunan Infrastruktur Desa;
- Subsidi harga pupuk dan benih bagi petani kecil;
- Bantuan modal bagi usaha perempuan, perbaikan 10.000 rumah rakyat miskin, gratis akte kelahiran;
- Bantuan sarana prasarana olah raga, seni budaya serta mengembangkan keunggulan pariwisata lokal;
- Bantuan keuangan bagi masjid dan madrasah diniyah.



“

Untuk bidang infrastuktur yang juga bagian dari janji politiknya, dimana dalam janji kampanye dialokasikan sebesar Rp 300 milyar, namun kenyataannya mencapai lebih dari Rp 300 milyar.



66  
Terkait dengan pelayanan publik mendapatkan perhatian secara khusus, semisal : Puskesmas, sekolah, BPMPT, dan UMKM terutama terkait dengan perijinan dan koperasi

terangnya.  
Di tahun 2017 akan terlihat kenaikan atau penurunan angka kematian ibu dan bayi, maka didalamnya harus ada kerjasama bahu membahu antara rumah sakit dan Puskesmas.

Kemudian di bidang pendidikan, Kabupaten Garut masih dihadapkan dengan banyaknya angka partisipasi sekolah dengan rata-rata 6,8 atau setara dengan tidak tamat SMP. "Oleh karenanya, program yang dilakukan salah satunya adalah program bagaimana agar masyarakat yang tidak melanjutkan ke SMP atau tidak lulus SD tidak melanjutkan SMP atau SMA, mereka tetap mendapatkan pendidikan dan mendapatkan ijazah", jelasnya. Program unggulan ini disebut rumah pintar atau rumah cerdas yang bertujuan untuk

meningkatkan pendidikan.

Untuk meningkatkan daya

beli, tentu harus didukung perbaikan infrastuktur jalan, jembatan dengan keseimbangan infrastruktur utara dan selatan.

Terkait dengan pelayanan publik mendapatkan perhatian secara khusus, semisal : Puskesmas, sekolah, BPMPT, dan UMKM terutama terkait dengan perijinan, koperasi menjadi perhatian secara khusus.

Sedangkan untuk yang sudah berjalan dengan baik dirinya ingin ada peningkatan pelayanan. "Salah satu contoh misalkan Puskesmas kita lakukan akreditasi nasional, termasuk untuk SDM", ungkapnya.

Diharapkan tahun 2018 telah berdiri gedung-gedung Puskesmas yang representatif, sehingga nanti masyarakat ketika ke Puskesmas akan merasa terfasilitasi dan terlayani dengan baik.(\*)



# Setda Topang Pencapaian Visi Pemda Garut



H. Iman Alirahman, SH., M.Si

Implementasi kebijakan kepala daerah sangat bergantung kepada sejauhmana seluruh komponen di dalam Pemerintah Daerah mampu melaksanakannya dengan seoptimal mungkin.

Disinilah peran penting Sekretariat Daerah (Setda) yang dipimpin Sekretaris Daerah dalam mendorong kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya.

**S**ekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, H. Iman Alirahman, SH., M.Si, menjelaskan, dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah itu memiliki fungsi pelayanan ke dalam. Lebih ke bagaimana Sekretaris Daerah sebagai pimpinan Sekretariat Daerah itu menjalankan fungsi memberikan pelayanan dalam rangka penyusunan kebijakan kepala daerah.

Mencapai visi “Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan

Sejahtera”, dimensinya cukup luas. Kedudukan Setda ini harus mampu mendukung pada berjalannya program-program kegiatan menyangkut pendidikan, kesehatan, perekonomian, termasuk pembangunan infrastruktur. Dalam konteks sebagai katakanlah fungsi pelayanan, Setda menjadi miniaturnya Pemda. Sehingga melalui pendekatan baik itu koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program kegiatan berjalannya visi itu tentu banyak ditentukan oleh evektifitas dari Setda.

## Tema Pembangunan Tahun 2017

Penguatan Infrastruktur Daerah dan Pelayanan Publik serta Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Menuju Masyarakat Garut yang Nyaman dan Sejahtera

De-  
ngan peruntukkan lahan Kabupaten Garut yang 81,39 persen sebagai kawasan yang harus berfungsi lindung, upaya untuk meningkatkan IPM ini bukan pekerjaan gampang. Sebab, kawasan budidayanya hanya 18,61 persen. Oleh karena itu, dengan IPM sekarang 63,21 point. Ini adalah salah satu bukti nyata dari perjuangan beratnya Pemda.

“Kita melihat jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Rudy Gunawan dan Bapak dr. Helmi Budiman itu diikat oleh RPJMD. Oleh Perda No. 3 Tahun 2014. Perjalanan selama lima tahun ke depan maka itu ditentukan oleh tema-tema pembangunan sebagai fokus dan sasaran yang ingin dicapai. Mulai dari tahun 2014 sampai 2019,” katanya.

Ditambahkannya, Sekda dalam kedudukannya membantu kepala daerah, menjalankan fungsi sebagai Ketua TAPD. Maka Sekda mengkoordinasikan bagaimana proses perencanaan dan penganggaran sehingga Pemda dapat menjalankan kewajibannya dengan program kegiatan yang berkualitas sehingga visi Pemda dapat tercapai.

Sebagai contoh, misalnya di tahun 2016, fokus pembangunan itu dilakukan pada pendekatan 5 pilar. Pertama, bagaimana kegiatan Pemda mampu meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Artinya, fungsi Pemda baik itu menyangkut pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, itu dirasakan jauh lebih baik.

Ukurannya itu dari indikator makro pembangunan. Bagaimana meningkatnya IPM, laju pertumbuhan ekonomi, berkurangnya angka kemiskinan, berkurangnya angka pengangguran, termasuk bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik.

Pilar yang kedua, tanggung

jawab Pemda di dalam pengelolaan terutama keuangan dan seluruh program yang menjadi kewajiban Pemda itu dapat diterima. Dalam pengertian memenuhi aspek akuntabilitas. Sehingga dalam pertanggungjawaban konteks keuangan ini mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini sangat penting, sebab antara perencanaan dan pertanggungjawaban ini tak boleh terputus. Kalau perencanaan bagus, seperti halnya kita pernah mendapatkan penghargaan di bidang perencanaan maka pertanggungjawaban sebagai muara akhir dalam pelaksanaan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Ukurannya adalah tentu saja opini BPK. Sebab itu merupakan bagian penting di dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan atau katakanlah azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Pilar berikutnya, pihaknya ingin mendapatkan kenaikan IPM yang signifikan. Dengan peruntukkan lahan Kabupaten Garut yang 81,39 persen sebagai kawasan yang harus berfungsi lindung, upaya untuk meningkatkan IPM ini bukan pekerjaan gampang. Sebab, kawasan budidayanya hanya 18,61 persen. Oleh karena itu, dengan IPM sekarang 63,21 point. Ini adalah salah satu bukti nyata dari perjuangan beratnya Pemda.

Jadi ini gambaran sinerginya antar semua komponen, pihak-pihak Pemda, diperkuat fungsi pengawasannya legislatif, tentu saja juga ada dukungan dari masyarakat.

Selanjutnya, pilar yang berkaitan dengan mengurangi angka

kemiskinan. Ini pun menjadi bagian yang tak terpisahkan. Sekarang ini menurut catatan BPS rata-rata pengeluaran per kapita per tahun hanya Rp 6.875.000. Sehingga kalau dihitung berdasarkan jumlah hari maka pengeluaran kita per hari itu berapa.

“Jadi, ini kondisi yang cukup berat. Sehingga Pemda akan terus berupaya dan kami sebagai pembantu Kepala Daerah, dan seluruh jajaran SKPD bagaimana menciptakan iklim berusaha di Garut secara sehat,” ucapnya.

Dijelaskan Sekda, meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak cukup mengandalkan anggaran

publik yang ada dalam APBD. Yang tahun 2017 ini hanya memiliki kemampuan keuangan daerah senilai Rp 3,7 triliun. Padahal, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan kita harus membuka lapangan kerja yang banyak. Oleh karena itu, kita butuh investasi. Karenanya, Pemda memberikan dukungan penuh agar masyarakat ini di tahun 2017 dan tahun-tahun berikutnya itu memperoleh kesempatan kerja dan lapangan usaha yang lebih baik.

Makanya Garut sekarang sudah mulai diminati oleh investor untuk menanamkan modalnya di bidang industri. Walaupun bukan industri berat, seperti halnya PT Changsin itu bisa membuka lapangan kerja. Bisa menyerap 4.000 tenaga kerja, bahkan kalau berkembang itu akan lebih dari sebanyak itu.

Kemudian, hal lain yang menjadi fokus pembangunan sekarang adalah perbaikan infrastruktur. Ini melalui program Amazing, Bupati telah menetapkan kebijakan pembangunannya lebih kepada perbaikan infrastruktur jalan. Bagaimana misalnya di tahun 2015, tahun 2016, wilayah selatan itu jalan-jalan diperbaiki. Pamegatan Cikajang sampai Singajaya dan tahun ini dilanjutkan sampai dengan Toblong itu di hotmix. Hampir panjang 25 km.

“Saya kira ini satu kebijakan yang sangat mendasar dalam rangka untuk bisa memberikan kesempatan masyarakat untuk berusaha lebih baik. Sekalipun memang harus diakui bahwa kondisi geografis Garut itu cukup labil sehingga jalan yang sudah diperbaiki ini ada sebagian yang keadaannya sudah rusak. Ini juga menjadi program yang akan kita lanjutkan,” katanya.



“

Makna yang paling utama itu momentum instropeksi melakukan renungan atas apa yang sudah dilakukan, hasilnya bagaimana, dan harapan kita kedepan. Tentu saja harus disadari bahwa Pemda bukan organisasi yang sempurna. Bahwa Pemda sudah berbuat banyak iya, tapi tak sedikit juga yang perlu diperbaiki.

Termasuk pembukaan jalan baru, koridor Garut bagian tengah mulai dari Kadungora, Leles, sampai Banyuresmi. Kemudian Koridor Cipanas mulai dari Kubang sampai Samarang saat ini sudah mulai pada tahap pembebasan tanah. Termasuk diantaranya adalah pembangunan jalan baru yang nanti akan menghubungkan By Pass II ke Jalan Sudirman. Itu kurang lebih 61 km panjang jalan yang akan dibangun.

“Ini hal-hal yang menurut saya sangat fundamental dalam rangka pembangunan di Garut di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Gunawan dan Wabup dr. Helmi Budiman,” ungkapnya.

Mengenai Makna HJG ke-204, H. Iman Alirahman, mengatakan, makna yang paling utama itu momentum instropeksi melakukan renungan atas apa yang sudah dilakukan, hasilnya bagaimana, dan harapan kita kedepan.

Tentu saja harus disadari bahwa Pemda bukan organisasi yang sempurna. Bahwa Pemda sudah berbuat banyak iya, tapi tak sedikit juga yang perlu diperbaiki. Mulai dari pembinaan kepegawain yang masih harus terus ditingkatkan agar ASN Pemda Garut menjadi ASN yang memiliki sikap yang inovatif, kinerja yang kompetitif, dan memiliki daya saing.

Kaitan dengan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya ini harus lebih baik. Jadi berbagai nilai-nilai, prinsip-prinsip, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima itu harus diwujudkan. Harus



bisa melakukan evaluasi atas apa yang sudah dilakukan.

“Alhamdulillah, saya kira di bawah kepemimpinan Bapak Rudy Gunawan dan Bapak dr. Helmi Budiman komitmen untuk melakukan perbaikan itu sudah ada.

Termasuk soal penempatan dalam jabatan. Saya kira ini juga bagian penting yang harus disyukuri oleh kita semua. Bagaimana kebijakan penempatan jabatan itu dilakukan secara objektif,” ucapnya.

Dijelakannya, setelah PP 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah itu ditetapkan, pengisian jabatan itu dilakukan melalui sebuah proses yang transparan, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk jabatan tinggi pratama diawali dengan seleksi terbuka. Kemudian mekanisme penilaian oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang sama sekali tidak diintervensi oleh user atau unsur-unsur lain di Pemda.

“Saya sebagai Sekda yang notabene Ketua Baperjakat tidak masuk dalam Pansel sehingga saya pun tidak tahu siapa (yang lolos seleksi). Ini sepenuhnya didasarkan atas evaluasinya Pansel terhadap baik kemampuan, menyangkut soal evaluasi kinerja. Termasuk saya sendiri pun dievaluasi. Sekali lagi, komitmen ini sudah sangat jelas,” tegasnya.

Sekda berharap, ke depan bahwa komitmen untuk memperbaiki ini bukan sekadar dari pimpinan. Tapi seluruh ASN itu harus mampu mewujudkan komitmen itu untuk bisa lebih baik ke depan terutama dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. (\*)



Tiga fungsi melekat di DPRD yakni budgeting (penganggaran), legislasi dan pengawasan. RPJMD menjadi patokan DPRD Garut dalam penyusunan program kegiatan yang diajukan Pemda.

## DPRD Pastikan Pembangunan Mengacu RPJMD

**K**etua DPRD Garut Ade Ginanjar menyatakan, pihak DPRD sampai sekarang terus mengoptimalkan peran-peran tersebut. Untuk pengawasan, DPRD melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung.

Untuk pengawasan langsung, lanjutnya, pihaknya terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengawasi suatu proyek pembangunan apakah sesuai dengan bestek yang telah ditentukan atau belum. "Kalau belum, tentu saja

kita akan membuat catatan-catatan untuk nanti disampaikan kepada pihak eksekutif," katanya.

Sementara pengawasan tidak langsung adalah dalam tahap penyusunan anggaran. Acuan DPRD, kata Ade, adalah RPJMD sehingga suatu program yang diajukan oleh pihak eksekutif akan disinkronkan dengan RPJMD yang telah disepakati bersama.

"Kalau tidak sesuai tentu saja kita harus menyesuaikannya sebab RPJMD merupakan patokan pembangunan, baik dari sisi anggaran maupun arah pembangunan," paparnya.

Terkait

“  
Kalau tidak sesuai tentu saja kita harus menyesuaikannya sebab RPJMD merupakan patokan pembangunan, baik dari sisi anggaran maupun arah pembangunan



Ade Ginanjar, S.Sos



## Makna HJG ke-204

HJG merupakan momentum untuk lebih memotivasi diri sehingga bekerja lebih baik untuk kepentingan Garut. Pembangunan di Garut lebih maju lagi sesuai dengan yang telah digariskan dan target-target tercapai. Intinya, pembangunan tersebut harus lebih mensejahterakan warga Garut untuk semua lapisan dan di semua penjurur

Ade Ginanjar, S.Sos

peran legislasi, Wakil Ketua DPRD, H. Yogi Yuda Wibawa, SE,MM menambahkan, DPRD dengan perannya tersebut terus melakukan penyusunan perda-perda yang diperlukan yang tentu saja harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan di atasnya. "Alhamdulillah beberapa perda telah rampung kami susun dan beberapa di antaranya bahkan telah efektif diimplementasikan," ujarnya.

Namun Yogi mengaku, pihak DPRD masih memiliki garapan beberapa perda yang harus segera rampung. "Kami berharap tahun 2017 ini selesai sehingga bisa langsung diundangkan," katanya.

Mengenai program unggulan di tahun 2017, Yogi menjelaskan, sebenarnya tak ada program unggulan untuk DPRD. Menurutnya, DPRD hanya akan terus mengotimalkan peran dan



H. Yogi Yuda Wibawa, SE,MM

fungsinya sesuai dengan kewenangannya yakni di bidang budgeting, pengawasan, dan legislasi agar pembangunan sesuai dengan track yang telah ditetapkan. "Namun ada beberapa prioritas pekerjaan bagi kami di tahun 2017 di antaranya ya merampungkan sejumlah perda," katanya.(\*)







## UU ASN, *The Right Man In The Right Job*

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum lahir hingga sekarang, namun spirit dari UU ASN telah diimplementasikan oleh sejumlah Pemda di Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Garut.

**M**eskipun peraturan pelaksanaan untuk mengimplementasikan UU No 5 Tahun 2014 belum ada, namun kita bisa menangkap ruh atau spirit dari UU tersebut. Demikian dijelaskan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, H. Burdan Ali Junjuran, S.H., M.Si.

Dengan mengacu kepada peraturan pelaksanaan kepegawaian yang masih berlaku sekarang, lanjutnya, Pemkab Garut mencoba mengimplementasikan semangat UU ASN dalam mengelola bidang kepegawaian agar terwujud aparatur yang kompeten dan profesional.

Menurut Buldan, UU ASN pada

prinsipnya menyatakan bahwa pegawai pemerintah yang dalam UU No. 5/2014 disebut sebagai Aparatur Sipil Negara bukanlah pegawai, melainkan seorang profesional yang memiliki kualifikasi dan kompetensi. "Dan sebagai seorang profesional, selain memiliki kualifikasi dan kompetensi, ASN juga terikat oleh kode etik yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pekerjaannya. Itulah semangat UU ASN yang kita tangkap dengan berbagai kajian," katanya.

Buldan menegaskan, semangat yang terkandung dalam UU ASN jika diimplementasikan tentu saja akan berdampak positif terhadap kinerja pemerintah sebagai

pelayan dan pengayom masyarakat. "Pasalnya, jajaran pemerintahan diisi oleh tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Aparat itu pun akan melaksanakan pekerjaannya dengan penuh integritas dan dedikasi sebab terikat oleh kode etik yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Untuk mengetahui kompetensi dan kualifikasi aparat yang ada, lanjut Buldan, Pemkab Garut belakangan ini telah beres menggelar uji kompetensi kepada seluruh jajaran pegawai dari Eselon II hingga IV. "Uji Kompetensi kepada para pegawai yang telah kami laksanakan, pada prinsipnya adalah implementasi dari UU ASN tersebut. Dengan uji kompetensi tersebut, Pemkab Garut ingin membedah atau mengetahui sejauh mana dan kompetensi apa yang dimiliki para pegawai yang ada sekarang. Hasilnya, kini Pemkab telah memiliki peta

kompetensi para pegawai yang ada sejak Eselon II hingga IV. Peta ini tentu saja sangat berguna bagi Pemkab terutama dalam pelaksanaan penempatan pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Ke depan tak akan ada lagi pegawai yang ditempatkan di bidang pekerjaan yang bukan keahliannya, melainkan akan ditempatkan sesuai sesuai kompetensinya yang mengacu kepada hasil uji kompetensi tersebut," tuturnya.

Buldan menjelaskan, dengan Uji Kompetensi yang telah dilaksanakan kepada seluruh pegawai di jajaran Pemkab Garut, ada sistem yang telah dibangun di bidang kepegawaian. Menurutnya, pada tahun 2017 sekarang ini, sistem tersebut akan lebih diimplementasikan lagi bahkan dikembangkan lebih jauh.

"Pengembangan tersebut di antaranya adalah mengembangkan dan menguatkan kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai dengan berbagai pelatihan agar kinerja mereka lebih bagus lagi sebagai pelayan dan pengayom masyarakat," katanya.

Masih terkait dengan program kepegawaian di tahun 2017, Buldan menyatakan, pihaknya akan berusaha meminimalisir tindakan atau perilaku indisipliner pegawai sehingga angka pelanggaran yang dilakukan pegawai menjadi sangat kecil atau kalau bisa mencapai nol.

"Program tahun 2016 harus dilanjutkan. Pada tahun itu ada 16 pegawai yang terkena sanksi karena melakukan tindakan indisipliner. Dampaknya sangat positif. Sejak sanksi itu dikenakan kepada ke-16 orang tersebut, tidak ada lagi tindakan indisipliner yang dilakukan para pegawai,"

jelasnya.

### **Tak Ada Istilah "Anak Emas"**

Buldan menuturkan, semangat UU ASN mengamanatkan bahwa pengisian jabatan harus didasarkan atas kompetensi dan profesionalitas, bukan oleh variabel lain, apalagi kedekatan. "Ada transparansi sehingga semua orang akan faham mengapa si A mengisi jabatan itu dan selanjutnya," tegasnya.

Instrumen untuk menilai kinerja seorang aparatur pun, menurut

66  
Akan berusaha meminimalisir tindakan atau perilaku indisipliner pegawai sehingga angka pelanggaran yang dilakukan pegawai menjadi sangat kecil atau kalau bisa mencapai nol

Buldan, akan jelas dan netral sebab masing-masing aparatur akan memiliki SKP (Sasaran Kerja Pegawai). Dari SKP-lah akan terlihat apakah kinerja si pegawai tersebut mencapai atau belum atau bahkan melampaui target. "Dari SKP-lah seorang pegawai dipertimbangkan dalam jabatannya, apakah dilanjutkan, dibebaskan, atau bahkan dinaikan," bebarnya.

Dengan demikian, menurut Buldan, dengan sistem tersebut tak akan ada lagi istilah pegawai "anak emas" atau "anak tiri" sebab masing-masing akan dinilai dari hasil kerja yang terbaca dari SKP. "Itulah yang dinamakan dengan sistem meritokrasi atau achievement atau kerja

berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan unsur kedekatan," katanya seraya menambahkan, setiap semester atau enam bulan, Pemkab akan melakukan penilaian terhadap SKP masing-masing pegawaidan dari hasil penilaian itulah akan meunculkan pertimbangan apakah si pegawai tersebut bertahan dalam jabatannya atau diturunkan.

Buldan mengatakan, kemampuan BKD untuk mengelola para pegawai, termasuk menemukannya di bidang yang sesuai dengan kompetensi masing-masing, merupakan salah satu bentuk pelayanan BKD kepada masyarakat. "Harap dipahami, sesuai dengan tujuannya BKD tak terlibat secara langsung dalam bidang pelayanan masyarakat. Namun kesuksesan BKD dalam menempatkan orang atau pegawai di tempat yang sesuai sehingga masyarakat merasa terpuaskan dalam menerima pelayanan pegawai Pemkab itulah bentuk pelayanan kami kepada masyarakat Garut," katanya.

Lalu apa komentar orang nomor satu di BKD ini mengenai HJG? Menurutnya, HJG harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kedewasaan. "Jangan pernah puas dengan apa yang telah dicapai. Itulah kedewasaan," ungkapnya.

Buldan menyatakan, Kabupaten Garut tidak sendirian, tapi ada kabupaten-kabupaten lain yang kini terus memacu diri agar menjadi pemerintah daerah yang unggul dalam segala bidang. Ini artinya Kabupaten Garut harus berani berkompetisi dengan kabupaten lain. Dan kompetisi tersebut senjatanya adalah kompetensi," tuturnya. (\*)

# Tingkatkan Keterjangkauan Layanan Kesehatan



dr. H. Tenni Swara Rifai, M.Kes

**T**ekad Bupati Garut H. Rudy Gunawan untuk memperbaiki bidang kesehatan dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang mendorong aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Hingga sekarang sekira 20 Puskesmas sudah berstatus DTP (Dengan Tempat Perawatan).

Dituturkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, dr. H. Tenni Swara Rifai, M.Kes, belum lama ini, dari awal kepemimpinannya di tahun 2014, Bupati memfokuskan untuk membangun infrastruktur

Selain pembangunan fisik fasilitas layanan kesehatan, Pemda Garut juga melakukan penataan kelembagaan, sumber daya manusia, dan program-program kesehatan lainnya. Secara kasat mata dapat dilihat dari semakin baik dan lengkapnya pelayanan di Puskesmas maupun pustu. Dilakukan bertahap setiap tahun anggaran agar dapat menjangkau seluruh kecamatan.

Puskesmas. Sejalan dengan visi "Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera".

Tahun 2016 lalu saja, sedikitnya ada 60 kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan Puskesmas. Tahun ini akan dicoba dijalankan 10 Puskesmas di 10 kecamatan, seperti Talegong, Cikelet, Cibalong, Peundeuy, Banjarwangi, Karangtengah, dan Sukawening. Setidaknya, Bupati Rudy dapat menuntaskan setiap kecamatan minimal memiliki satu Puskesmas DTP.

Kendati belum seluruhnya berstatus DTP, namun ada pula yang sudah menyelenggarakan layanan ODC (one day care). Hal ini didukung dengan telah dilengkapinya Puskesmas dengan laboratorium sederhana seperti untuk penanganan kolesterol, gula darah, dan penyakit lainnya yang sering dikeluhkan masyarakat. Peningkatan fasilitas Puskesmas ini

sekaligus juga agar warga yang membutuhkan layanan medis tidak harus menumpuk di RSUD Garut. Apalagi, mereka kebanyakan berasal dari menengah ke bawah.

Dikatakan dr. Tenni, selain dari segi peralatan, setiap Puskesmas juga dilengkapi dengan ambulance. Terutama untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau akses transportasi, seperti halnya yang telah disalurkan ke Talegong, Mekarmukti, Bungbulang, Singajaya, dan lainnya.

Dari sisi penyediaan SDM dokter dan bidan pun dilakukan penambahan secara bertahap dan sekarang semua Puskesmas minimal memiliki seorang dokter. Diantaranya dilakukan upaya perekrutan CPNS dokter melalui jalur khusus tanpa dikenakan biaya. Begitupun untuk pemenuhan bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang telah dijalin kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan RI.





Saat ini pun, lanjutnya, atas dorongan Bupati maka para tenaga medis maupun kesehatan seperti perawat telah banyak yang menempuh pendidikan lanjutan bahkan hingga pasca sarjana. Dengan kata lain, agar memiliki keterampilan yang lebih baik guna melayani masyarakat.

Diakui dr. Tenni, Bupati memiliki perhatian serius terhadap bidang kesehatan. Bahkan, telah mengunjungi langsung ke banyak Pustu (Puskesmas Pembantu) yang dirinya pun belum pernah mendatanginya.

“Jadi, kalau di pikir-pikir, Bupati lebih aktif dari pada komunitasnya (stakeholder bidang kesehatan). Ini harus diperlukan pengakuan dari kami bahwa Bupati lebih paham kesehatan daripada kepala dinas-nya,” selorohnya.

Dari sisi kelembagaan dan manajemen, tambah dr. Tenni, Pemda terus mendorong penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas. “Garut pun menjadi tempat studi tiru, meminjam istilah Pak Sekda, dalam pengelolaan BLUD Puskesmas. Ini semua mustahil bisa terlaksana jika tidak ada dorongan dari kepala daerah,” katanya.

Dalam hal penanganan Angka Kematian Ibu/Bayi (AKI/AKB), Dinkes melakukan pendekatan yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Para tenaga medis dan kesehatan diajak terbuka untuk melakukan pelaporan

dan tak akan disalahkan atas kasus kematian ibu/bayi. Kalaupun dulu AKI/AKB sedikit itu lebih karena banyak yang tidak melaporkan. Jadi, ibarat fenomena gunung es.

Keterbukaan dalam pelaporan AKI/AKB diperlukan agar penanganannya dapat lebih ditingkatkan. Selama penanganan yang dilakukan sesuai prosedur, kalaupun pada akhirnya ditakdirkan meninggal dunia, maka itulah takdir dari Allah SWT. Dengan semakin banyaknya tenaga medis dan kesehatan serta fasilitas layanan kesehatan, maka pelaporan AKI/AKB pun semakin terbuka.

Ditambahkan dr. Tenni, mengapresiasi kebijakan dari Bupati yang memberikan keleluasaan dalam hal pengelolaan SDM kepada kepala dinas seperti dalam hal penggantian

atau pengangkatan pegawai dari tugas tertentu sesuai SOTK.

Adapun berkaitan dengan RSUD Garut, dijelaskannya, nantinya RSUD akan di bawah kewenangan Dinas Kesehatan. Bupati menginginkan peralihan pengelolaan RSUD ke dinas kesehatan dilaksanakan satu tahun setelah ini. Namun demikian, DPRD masih mempertimbangkan bahwa pelimpahan kewenangan baru bisa dilaksanakan 2 tahun lagi karena harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh.

Perihal program unggulan di tahun 2017, dijelaskan dr. Tenni, pihaknya mengacu kepada arahan Bupati sesuai dengan arahan Kemenkes RI, diantaranya dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Program kegiatan ini terdiri dari lima pilar yakni ODF (Open Defecation Free)/ Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum/makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Mengenai pilar pertama, setiap tahun Garut dapat menambah desa yang sudah deklarasi ODF. “Pengelolaan lingkungan yang sehat merupakan suatu hal utama untuk membangun masyarakat yang sehat. Untuk itu, dalam rangka Hari Jadi Garut ke-204 ini marilah kita bangun Garut yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya. (\*)



Tahun 2017 ini RSUD dr. Slamet Garut sedang fokus pada upaya memperbaiki angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan tujuan menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Garut, aman dan terjangkau.

Pihak RSUD ingin menghapus citra kurang baiknya yang tumbuh di sebagian masyarakat Garut. "Jujur kami katakan bahwa

bekerja di lingkungan rumah sakit ramah terhadap pasien dan pengunjung. "Secara gampangnya itu. Dan dengan perbaikan dalam dua hal tersebut, saya yakin indeks kepuasan masyarakat akan terdongkrak," ujarnya.

Namun, tegas Maskut, dari hasil akreditasi, ternyata selain harus ada upaya dalam dua hal tersebut, pihak rumah sakit pun harus memperbaiki sekitar 1.000 elemen yang terkait dengan kinerja rumah sakit. "Jadi lebih banyak lagi. Tapi tak apa, itu kan upaya besar untuk mencapai



dr. Maskut Farid

## RSUD dr. Slamet Garut

# Tahun 2017, Fokus pada Pelayanan

sekarang ini dan waktu-waktu ke belakang image sebagian masyarakat terhadap RSUD kurang baik," jelas Direktur RSUD dr. Slamet, dr. Maskut Farid, beberapa waktu lalu.

Menurut Maskut, image kurang baik tersebut tumbuh terutama berkaitan dengan faktor pelayanan. "Masyarakat menilai bahwa pelayanan RSUD kepada mereka kurang baik sehingga tak memuaskan," lanjut.

Berangkat dari situ, lanjut Maskut, maka pada tahun 2017 ini pihaknya akan fokus pada upaya peningkatan pelayanan demi kepuasan masyarakat Garut. Dengan demikian, pelayanan menjadi program unggulan pihak RSUD untuk program kerja tahun 2017.

Beberapa upaya pun telah dilaksanakan, di antaranya perbaikan sarana prasarana RSUD termasuk gedung, peralatan dan sebagainya. Dan bahkan untuk mengetahui titik lemah RSUD, pihak RSUD telah mengikuti akreditasi.

Maskut mengatakan, secara kasar sebenarnya mendongkrak indeks kepuasan masyarakat, atau dengan kata lain, meningkatkan pelayanan, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, gedung dan lingkungan yang bersih dan kedua SDM yang

tujuan kami dalam meningkatkan pelayanan. Jika 1.000 item tersebut bisa diperbaiki, maka upaya kami akan terwujud," ujarnya.

### Lingkungan dan Kualitas SDM

Pelayanan yang baik dicirikan oleh tersedianya lingkungan yang baik pula. Menurut Maskut, upaya pihak RSUD pada tahun-tahun ke belakang menggenjot pembangunan gedung dan lingkungannya, merupakan salah upaya untuk meningkatkan pelayanan. Tujuannya membuat pasien dan pengunjung aman dan nyaman berada di rumah sakit.

"Hampir 70 persen bangunan yang ada di rumah sakit ini merupakan bangunan baru. Dan kami pun pada tahun ini akan membangun IGD karena kurang representatif untuk melayani pasien yang semakin banyak, gedung bedah sentral juga akan diperbaiki karena antrean operasi sudah sangat tinggi, kemudian membangun pula gedung farmasi.

Selain itu pihak RSUD pun terus mempercanggih alat kesehatan, di antaranya CT scan. "Kami memiliki alat CT scan yang canggihnya sama dengan yang dimiliki RSHS Bandung," jelasnya.

Selain memperbaiki lingkungan, kata Maskut, pihak RSUD pun akan memperbaiki SDM sehingga memiliki SDM yang ramah, trampil dan profesional dalam bekerja. "Image kurang baik yang tumbuh di masyarakat selama ini, faktor terbesar akibat SDM. Jadi faktor SDM merupakan faktor kunci dalam pelayanan," jelasnya seraya menambahkan, upaya peningkatan pelayanan pun akan dimantapkan dengan memperbaiki alur-alur pelayanan sehingga dirasa mudah, simple dan cepat.

Disinggung pemulihan pasca Banjir Bandang yang juga menerjang RSUD dr. Slamet, beberapa waktu lalu, dr. Maskut, menjelaskan, sebenarnya percepatan recovery yang dilakukan pihak rumah sakit terbilang cepat sebab hanya dalam waktu seminggu efek banjir sudah biasa diatasi.

"Namun, ada beberapa alat yang sangat mahal yang hingga kini belum bisa dioperasikan karena belum diperbaiki. Selain itu hingga sekarang masih ada lumpur banjir di halaman sehingga jika banyak pengunjung maka lumpur tersebut terbawa ke dalam rumah sakit. Jadi sekarang ini kami harus ekstra keras dalam melakukan kebersihan harian," paparnya. (\*)

Wakil Bupati Garut, dr. H. Helmi Budiman saat meresmikan fasilitas gedung baru RSUD dr. Slamet Garut, tahun 2016 lalu.



# Disdik Berupaya Dongkrak APK APM

Penurunan peringkat APK dan APM Kabupaten Garut karena rumus baru dalam penghitungannya itu cukup dilema bagi Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut.

"Dengan sistem penghitungan APK dan APM yang baru, seolah-olah buah kerja keras Dinas Pendidikan berserta seluruh jajaran dan dukungan Pak Bupati serta Pak Wakil Bupati selama ini hilang sudah. Sistem penghitungan yang baru tersebut menempatkan Garut pada posisi 26 dari 27 daerah yang ada di Jawa Barat," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Drs. H. Mahmud, M.Si., baru-baru ini.

Menurutnya, dalam sistem penghitungan APK dan APM yang baru, penghitungan lama sekolah penduduk dilakukan pada penduduk usia 25 tahun ke atas, bukan dari usia dini. Dengan sistem itu Garut hanya memiliki angka 6,3. "Celaknya, dengan angka itu pula Garut berada di ranking 26 dari 27 daerah yang ada di Jabar," jelas Mahmud.

Dengan tidak bermaksud menutupi APK dan APM yang memprihatinkan tersebut, Mahmud menyatakan, sesungguhnya telah banyak yang dilakukan Pemkab Garut, khususnya Dinas Pendidikan dalam memperluas kesempatan mengenyam pendidikan bagi warga Garut. Di antaranya membuka seluas mungkin pendirian PAUD dengan melibatkan partisipasi dan swadaya masyarakat.

Hasilnya, bisa disaksikan dari lembaga pendidikan untuk usia dini mulai dari KOBER, TK, TKA, RA, MI dan sebagainya berdiri di setiap RW. Hebatnya lagi, pendirian lembaga pendidikan tersebut 99 persen murni atas swadaya masyarakat. Artinya, masyarakatlah yang berinisiatif membangun gedung, menyediakan

Sistem baru dalam penghitungan APK (Angka Partisipasi Kasar) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang diberlakukan pemerintah sangat "merugikan" Kabupaten Garut. Dengan sistem tersebut, Kabupaten Garut sekarang ini berada di posisi 26 dari 27 daerah yang ada di Jawa Barat dalam angka APK dan APM.

tanah, menyediakan meja dan kursi dan menyediakan guru-gurunya.

Masyarakat kini kian sadar bahwa pendidikan itu penting dan mutlak keberadaannya sehingga mereka bersemangat mendirikan lembaga pendidikan di setiap penjuru. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tersebut tumbuh tentu saja berkat gencarnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terutama Dinas Pendidikan.

Menurut Mahmud, dalam perhitungan APK dan APM sistem lama, saat bernama Wajardikdas 9 tahun, Garut justru sangat unggul di Jawa Barat. "Pasalnya, maraknya pendidikan PAUD di setiap RW yang ada di Kabupaten Garut memberikan kontribusi terhadap besaran penghitungan APK dan APM Wajardikdas. Namun sekarang, karena yang dihitung mulai usia 25 tahun, maka upaya kita tersebut tak memberikan kontribusi sama sekali terhadap APK dan APM," ujarnya.

Mahmud menjelaskan, dengan sistem APK dan APM yang baru, perguruan tinggi (PT) memberikan kontribusi yang sangat besar. "Sementara di Garut, perguruan tinggi baru ada sekitar 15 PT. Dan itu pun selain belum begitu lama berdiri,

semuanya swasta, belum negeri. Jadi, warga Garut yang hendak meneruskan ke PTN, harus berangkat ke luar Garut," paparnya.

Namun tentu saja rangking memprihatinkan di bidang APK dan APM tak membuat Dinas Pendidikan patah arang, apalagi melakukan protes. "Penghitungan itu sudah menjadi aturan sekarang dan kita tentu saja harus menerimanya dengan lapang dada. Lebih dari itu, Dinas Pendidikan berkewajiban membuat program terobosan untuk mengejar ketertinggalan dalam hal APK dan APM tadi," tutur Mahmud.

Banyak hal yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk mengejar ketertinggalan di bidang APK dan APM, tegasnya. Di antaranya menggelorakan pendirian rumah cerdas atau PKBM di berbagai pelosok. Menurut Mahmud, dengan keberadaan rumah cerdas atau PKBM, masyarakat yang sudah cukup umur namun belum memiliki ijazah SD, SMP atau SMA, bisa masuk menjadi peserta didik di rumah cerdas yang tentu saja nantinya akan memperoleh ijazah sesuai jenjang atau paket yang



Drs. H. Mahmud, M.Si.

ditempuh. "Untuk paket A ijazah yang diperoleh setara dengan SD, Paket B setara dengan SMP dan untuk Paket C setara dengan SMA," katanya.

Bahkan menurut Mahmud, sekarang ini pihak Disdik tengah menyusun program kerjasama dengan para kepala desa se-Kabupaten Garut dengan leading sektor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Kerjasama tersebut diarahkan untuk menggelar pendidikan penyeteraan bagi perangkat desa yang belum memiliki ijazah SMA.

"Sesuai aturan yang sekarang berlaku, perangkat desa sekarang ini minimal harus berijazah SMA. Nah dengan adanya kerjasama tersebut, pihak Disdik akan mendukung pendirian Rumah Cerdas agar perangkat desa yang belum memiliki ijazah SMA, bisa ikut penyeteraan. Saya menilai ini penting, sebab menurut informasi Pemkab Garut akan segera mengefektifkan aturan bahwa perangkat desa harus berijazah SMA," katanya.

#### Apresiasi dari Pemerintah Pusat

Terlepas dari APK dan APM yang memprihatinkan serta berbagai terobosan yang dilakukan Disdik untuk mengejar ketertinggalan, ada satu prestasi yang diraih Garut dalam bidang pendidikan, yakni implementasi aturan periodisasi jabatan kepala sekolah sebagai amanat Perda No 11 tahun 2011.

Meski sempat menuai protes keras dari para kepala sekolah yang statusnya turun kembali menjadi guru, namun dengan didukung penuh oleh Bupati Rudy Gunawan, Disdik tetap melaksanakan aturan tersebut. "Aturan itu, apalagi sudah diundangkan, ya wajib dilaksanakan," tegas Mahmud, saat ditanya soal periodisasi jabatan kepala sekolah.

Implementasi periodisasi jabatan kepala sekolah tersebut, lanjutnya, memiliki tujuan bagus, yakni menumbuhkan semangat di para kepala sekolah agar inovatif dan

kreatif dalam pengelolaan pendidikan. "Kepala sekolah yang tak mau terkena aturan periodisasi ya harus menunjukkan sebuah prestasi. Nah, kepala sekolah yang berpretasi tentu saja tak akan turun kembali menjadi guru," katanya.

Pelaksanaan periodisasi kepala sekolah telah berhasil mengangkat sebanyak 256 kepala sekolah baru yang masih segar yang diharapkan memiliki semangat lebih untuk



#### Makna HJG ke-204

Dinas Pendidikan Garut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah Kabupaten Garut itu sendiri dengan segala dinamikanya.

Bahkan, di tangan dinas inilah pembangunan manusia Garut yang bernama pendidikan berada.

HJG ke 204 harus menjadi momentum introspeksi seluruh warga Garut termasuk jajaran birokrasi agar Garut ke depan lebih maju lagi. Apa yang sudah dilakukan untuk Garut selama ini? Mari kita introspeksi

H. Mamud, M.M.Pd

memajukan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. "Dan dengan pengangkatan 256 kepala sekolah baru tersebut, ada 256 kepala sekolah lama yang terpaksa harus turun jabatannya menjadi guru kembali. Mereka umumnya kepala

sekolah yang telah menjabat kepala sekolah lebih dari dua periode atau lebih dari delapan tahun," paparnya.

Menurut Mahmud, dalam hal periodisasi kepala sekolah, Kemendikbud menilai Garut merupakan daerah yang paling konsisten dibanding daerah-daerah lain. "Tak heran jika Kemendikbud menghadihkan penghargaan kepada Pak Bupati sebagai kepala daerah yang konsisten mengimplementasikan periodisasi jabatan kepala sekolah. Penghargaan diterima Pak Bupati beberapa bulan ke belakang," ujarnya.

Program lainnya yang dilakukan Disdik Garut adalah merger sekolah dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Program ini bernama Amazing. Sekolah yang sudah dimerger di antaranya SDN Regol 7, 8, 9, 10, 11 di Garut Kota. Lima SD itu kini menjadi satu SD.

"Selain efisiensi dan efektifitas, merger juga merupakan bahan persiapan pelaksanaan full day school yang digagas Menteri Pendidikan sekarang," ujarnya.

Dari sisi efisiensi dan efektifitas, tandas Mahmud, merger jelas sangat tepat. Sebelum dilebur jadi satu SD, di kompleks SD Regol ada lima kepala sekolah, setelah dimerger menjadi satu kepala sekolah. Selain itu, tadinya ada rombongan belajar yang jumlah peserta didiknya kurang dari 20 orang. Kini setelah dimerger, peserta didik bisa memenuhi standar yakni 32 orang.

"Untuk kompleks SD Regol, merger juga dipersiapkan untuk pelaksanaan full day school yang nantinya tentu saja harus ada perbaikan di sana-sini. Di antaranya gedung sekolah atau ruang belajar yang representatif, di kompleks sekolah ada taman yang hijau, tempat untuk anak bersosialisasi, ada warung sekolah dan yang lainnya. Yang jelas, sekolah itu harus "pikabetaheun" anak didik dan anak didik menganggap bahwa sekolah merupakan rumah kedua bagi mereka," bebarnya. (\*)

# Akomodatif Industri, Tak Kesampingkan Pertanian

Meski berlabel baru, tapi sosok pimpinannya bukanlah orang baru di bidang yang berkaitan dengan pembangunan fisik ini.

Tiada lain adalah Drs. H.

Uu Saepudin, ST.,

M.Si., yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas SDAP.

"Karena baru berdiri dan Renstranya masih dalam penyusunan, maka program-program dan kegiatan sekarang ini untuk sementara kami hanya merangkum dan mengakomodir program dan kegiatan tiga dinas yang sudah dilebur," ujar Kepala Dinas PUPR, Uu Saepudin di ruang kerjanya.

Menyinggung soal penataan ruang yang kini masih dalam penggodokan dan menunggu pengesahan, Uu menjelaskan, penataan ruang yang diusulkan Pemkab beberapa waktu lalu sudah mendapat rekomendasi Gubernur Jawa Barat dan kini sudah berada di pusat dalam proses finalisasi. Ia berharap usulan penataan ruang segera mendapatkan pengesahan sehingga arah dan gerak pembangunan di Kabupaten Garut ada pedoman yang jelas. "Selain itu pembangunan yang dilaksanakan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Menurut Uu, pada prinsipnya, penataan ruang yang diusulkan tersebut memuat tentang adanya kawasan industri sebanyak lima kawasan. "Hemat kami pengaturan kawasan industri penting agar

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan SKPD yang baru berdiri satu bulan lalu, hasil penggabungan tiga dinas yakni Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP), Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Perumahan.

pembangunan industri terpusat dan tidak mengganggu kegiatan lain yang ada di masyarakat. Selain itu, dimuatnya kawasan industri dalam tata ruang yang baru, merupakan pertanda bahwa Garut siap menjadi daerah industri di samping mengandalkan kegiatan ekonomi lainnya seperti pertanian," paparnya.

Uu menilai, Garut akomodatif terhadap sektor industri karena menyadari bahwa pembangunan tanpa industri akan sulit berkembang. "Kita tentu harus membuka diri terhadap sektor industri agar Garut sejajar dengan kabupaten lain selain banyak manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat. Yang kasat mata dan mudah dirasakan di antaranya dalam penyediaan lapangan kerja. Dalam industri yang sudah ada di Garut, ribuan warga Garut bisa mendapatkan penghasilan karena bekerja di industri tersebut," ujarnya.

## Pembangunan Infrastruktur

Terkait pembangunan infrastruktur jalan, Uu menuturkan, Garut memiliki

jalan sepanjang 829 km dan sekarang ini ada sebagian yang harus sudah diperbaiki. Menurutnya, karena anggaran yang dimiliki Pemkab Garut sangat terbatas oleh karena perbaikan jalan harus ada skala prioritas.

"Dengan berbagai pertimbangan, kami harus melihat jalan mana yang harus didahulukan untuk diperbaiki. Sebab dengan anggaran yang ada dan terbatas tidak akan mungkin Pemkab bisa melakukan perbaikan secara keseluruhan," paparnya.

Namun, lanjutnya, selain akan melakukan perbaikan di beberapa titik, tahun 2017 ini Pemkab akan membangun jalan baru sepanjang 61 km. Jalan itu di antaranya membentang dari Leles ke Cangkuang. Jalan itu selain penting bagi warga Leles sekitarnya juga ditujukan sebagai jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan di sekitar industri Cang Sin yang sekarang ini setiap hari terjadi. "Para pengguna jalan Raya Leles bisa menggunakan jalur Leles Cangkuang untuk tujuan Garut atau sekitarnya agar tak terjebak macet," tuturnya.



Drs. H. Uu Saepudin, ST., M.Si.

Selain membenteng dari Leles ke Cangkung, jalan-jalan baru pun akan dibuka di beberapa tempat. "Hingga hari ini tahapnya baru sampai pada proses pembebasan lahan," katanya.

Mengenai bangunan, Uu menjelaskan, tahun ini Pemkab akan melanjutkan pembangunan GOR Ciateul terutama untuk sarana bola voli dan futsal. "Selain itu Pemkab pun akan menata kesempurnaan lahannya yang luasnya mencapai 12 ha. Dengan cara itu kami berharap tahun ini lahan tersebut segera bisa digunakan," katanya.

Ditambahkannya, meskipun menganggap bahwa sektor industri sangat penting bagi percepatan pembangunan, namun Pemkab Garut tak memorduakan pembangunan di bidang pertanian. Bahkan, katanya, pembangunan di bidang pertanian menjadi perhatian utama Pemkab. Maka untuk mendongkrak produktifitas di sektor pertanian Pemkab telah mencanangkan pembangunan beberapa irigasi.

Dari 38 irigasi yang menjadi kewenangan Pemkab, kata Uu, tahun ini Pemkab akan merehabilitasi dan merevitalisasi sebanyak 16 irigasi. "Dengan melihat anggaran dan berbagai pertimbangan, maka Pemkab memutuskan akan merivitalisasi sebanyak 16 irigasi pada tahun ini," paparnya.



## Makna HJG ke-204

Melihat umur dari Kabupaten Garut yang telah mencapai 204 tahun maka Garut sudah mencapai kedewasaan. Oleh karena itu, momentum Hari Jadi Garut harus menjadi wahana untuk lebih memotivasi agar bekerja dan membangun Garut lebih baik lagi. Dengan begitu masyarakat Garut akan merasakan dampak positif pembangunan tersebut.

**Drs. H. Uu Saepudin, ST., M.Si.**

Namun rehabilitasi 16 irigasi tersebut, menurut Uu, akan diikuti pula oleh perbaikan sebanyak 1.000 jaringan irigasi tersier yang tersebar di berbagai pelosok. "Kami sebagai dinas teknis tentu saja siap melaksanakan dan menyelesaikan apa yang sudah direncanakan tersebut," katanya.

Masih soal pembangunan irigasi, Uu menyebutkan, sekarang ini bendungan Leuwigoong (Copong) masih dalam proses pembangunan

menuju finalisasi dan Garut tentu saja menunggu serta akan mengikuti ke arah mana pembangunan irigasi Leuwigoong itu dibangun. "Nah jika bendungan leuwigoong selesai dibangun, kami tentu saja harus menyusun grand design pembangunan irigasi dengan mengikuti arah pembangunan Irigasi Copong," katanya.

Uu pun memaparkan, topografi Garut yang bergunung-gunung dan di sana-sini terdapat gunung berapi, juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan tata ruang yang baru yang telah diusulkan ke pusat. Dengan kondisi alam seperti itu, maka Garut menjadi salah satu daerah yang menjadi rawan bencana, baik bencana pergeseran tanah maupun bencana gunung berapi.

Oleh karena itu, grand design pembangunan yang disusun dalam tata ruang juga mengindahkan bahaya-bahaya bencana alam namun tetap bisa mengakomodir pembangunan juga bisa melindungi warga dari bahaya. "Jadi prinsipnya, pembangunan harus tetap dilaksanakan namun juga siasat penanganan bahaya bencana pun harus menjadi strategi dalam penyusunan tata ruang, di samping penggalan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat tidak boleh kita lupakan," katanya. (\*)



Budi Gan Gan, SH., M.Si



## Memperkuat Daya Tarik Destinasi Wisata

Mandiri, sejahtera dan merata. Barangkali itulah tujuan pembangunan yang kini digelorakan pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Garut. Salah satu sektor yang kini terus digenjot adalah sektor pariwisata.

**S**ektor pariwisata diharapkan mendorong terbangunnya kemandirian ekonomi berbasis ekonomi lokal lewat pembangunan usaha-usaha di destinasi wisata. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut, Budi Gan Gan, SH., M.Si, untuk mencapai kemandirian ekonomi berbasis ekonomi lokal dalam konteks pariwisata, lembaganya telah menyusun empat misi.

Pertama, pembangunan pariwisata. Misi ini implementasinya adalah berupa penguatan destinasi wisata yang sudah ada agar daya tariknya meningkat. "Selain penguatan terhadap destinasi yang sudah ada, kami juga melakukan pembangunan destinasi wisata yang baru ditemukan, di beberapa tempat," katanya.

Gan Gan menambahkan,

penguatan dan pembangunan destinasi wisata harus dilakukan agar destinasi wisata memiliki daya tarik sehingga memiliki outcome positif berupa peningkatan jumlah pengunjung. "Kami bercita-cita seluruh destinasi wisata dibangun sedemikian rupa agar memiliki daya tarik bagi pengunjung. Bahkan daya tariknya harus berstandar nasional," katanya.

Kedua, lanjut Gan Gan, pembangunan industri pariwisata. Untuk melaksanakan misi ini, menurutnya, tak bisa dilakukan Disparbud sendirian melainkan harus melibatkan banyak pihak dan SKPD termasuk pihak kecamatan dan elemen masyarakat. "Membangun industri pariwisata artinya menghidupkan perkenomian dari pariwisata yang bisa dirasakan masyarakat, minimal masyarakat di sekitar destinasi wisata. Maka untuk

mewujudkan tujuan ini harus banyak pihak terlibat termasuk masyarakat," paparnya.

Misi yang ketiga, lanjut Gan Gan, adalah pembangunan kelembagaan pariwisata secara menyeluruh baik membangun struktur kelembagaan, SDM di kelembagaan serta membangun sektor-sektor usaha pariwisata. "Pembangunan kelembagaan artinya selain membangun tata organisasi yang tepat untuk mengelola sektor pariwisata juga membangun aparatur di kelembagaan tersebut sekaligus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku-pelaku usaha wisata," jelasnya.

Sedangkan misi yang keempat adalah membangun promosi wisata yang tepat. Menurut Gan Gan pembangunan pariwisata intinya adalah bagaimana mendatangkan orang ke destinasi wisata baik dari dalam maupun luar Garut. Kegiatan ini diperlukan upaya promosi yang tepat agar masyarakat luas mengetahui keberadaan suatu destinasi wisata berkat berbagai unsur daya tariknya.

"Itulah keempat misi yang telah kami susun dan sedang kami laksanakan dalam membangun dunia



kepariwisataan di Kabupaten Garut," ujarnya.

Gan Gan menjelaskan, sesuai RPJMD tahun 2017, Garut menargetkan jumlah kunjungan wisata sebanyak 2,6 juta kunjungan hingga tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut pihak Dinas Pariwisata telah menyusun sejumlah strategi yang ujungnya tetap bermuara kepada penguatan destinasi wisata yang ada serta pembangunan destinasi wisata yang baru ditemukan.

Penguatan destinasi wisata yang telah ada, menurut Gan Gan, di antaranya memperkuat dan menambah daya tarik di suatu destinasi wisata agar bisa mendorong jumlah kunjungan. Menurutnya, jumlah daya tarik di suatu destinasi wisata agar memiliki dampak terhadap jumlah kunjungan minimal 10 hingga 30 daya tarik.

Gan Gan menilai tempat-tempat wisata di Garut masih perlu meningkatkan jumlah daya tarik. Ia mencontohkan objek wisata Bagendit. Ia mengakui jumlah daya tarik di situ yang terletak di Kecamatan Banyuresmi tersebut masih di bawah 10. "Masih di bawah 10, dan insya Allah akan kami



tingkatkan menjadi 38 daya tarik," katanya.

Menurut Gan Gan, untuk mendorong jumlah kunjungan ke Situ Bagendit, tak hanya cukup mengandalkan daya tarik yang sekarang sudah ada seperti sosoangan, rakit, dan kereta, melainkan harus ditambah dengan beberapa sarana yang bisa menarik minat masyarakat untuk datang ke tempat itu.

### Makna HJG ke-204

Pertama, HJG penting bagi generasi muda agar bisa mempelajari dan memaknai perjalanan Garut dari mulai berdiri hingga sekarang. Agar mereka lebih mengenal dan mencintai Garut.

Kedua, adalah momentum untuk membangkitkan motivasi masyarakat Garut untuk mendukung pembangunan Garut sehingga Garut lebih maju lagi. Dan ketiga, momentum untuk lebih menggerakkan seluruh masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan dan merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.

Budi Gan Gan, SH., M.Si.

Strategi lain untuk mencapai target kunjungan wisata ke Garut, lanjutnya, adalah mengimplementasikan konsep "cultur tourism". "Pagelaran-pagelaran budaya lokal harus terus disebarkan. selain itu Garut pun harus menggelar dan mengikuti berbagai festival budaya baik di dalam maupun luar Garut. Hal ini bertujuan agar budaya-budayaan yang



ada dan hidup di Garut dikenal oleh masyarakat luas secara nasional, bahkan internasional," katanya.

Namun Gan Gan mewanti-wanti, berbarengan dengan berbagai upaya tersebut, sapa pesona di setiap destinasi wisata pun harus tetap terjaga. "Apa artinya upaya-upaya tadi dilakukan kalau sebuah destinasi wisata tidak memberikan keamanan, kenyamanan, dan keindahan kepada pengunjung. Jadi menjaga sapa pesona di destinasi wisata juga sangatlah penting untuk menarik jumlah pengunjung," paparnya.

Gan Gan menyatakan, seluruh pembangunan pariwisata yang tengah dan sedang dilakukan berujung kepada satu tujuan yakni bagaimana menarik sebanyak-banyaknya pengunjung ke Garut dan kemudian berusaha agar si pengunjung tersebut mau membelanjakan uangnya di Garut. "Untuk sukseskan upaya ini diperlukan kerjasama semua pihak, tak bisa dilakukan pihak Dinas Pariwisata sendirian," tegasnya. (\*)

Pada tahun 2017 ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut memiliki beberapa program unggulan dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja agar memiliki daya saing.

**K**epala Disnakertrans Kab. Garut, H. Tedi, S.Sos., M.Si, menjelaskan, program unggulan tersebut di antaranya pemberian kerja sementara berupa padat karya kepada warga, pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, pelatihan warga transmigrasi lokal dan menggelar beberapa diklat untuk pencari kerja.

"Program unggulan tersebut sudah kami susun dan siap dilaksanakan pada tahun 2017 ini," jelas H. Tedi.

Program pemberian kerja sementara yang bersifat padat karya, menurut H. Tedi, akan digelar di sejumlah daerah dengan melibatkan banyak warga yang membutuhkan pekerjaan. Jenis pekerjaannya terutama dalam bidang pembangunan dan perbaikan infrastuktur, baik jalan, saluran air atau yang lainnya.

"Kemudian, pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri bentuknya berupa diklat bagi para pencari kerja agar mereka memiliki skill untuk hidup mandiri dengan cara berwiraswasta," katanya.

Sementara terkait pelatihan warga transmigrasi lokal, lanjut Tedi, ditujukan bagi warga Garut yang bertransmigrasi ke daerah masih seputar Garut karena salah satu sebab. "Mereka yang belum memiliki keahlian akan kami didik sehingga memiliki keahlian untuk berusaha sendiri," jelasnya.

Program unggulan terakhir yakni pelatihan bagi para pencari kerja. Menurut Tedi, program ini berupa pemberian keterampilan kepada para pencari kerja yang dibutuhkan lapangan kerja. "Penolakan lapangan kerja terhadap pencari kerja, selain akibat persaingan yang ketat juga di antaranya akibat pencari kerja tidak



## Membangun Daya Saing Tenaga Kerja

memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Terkait hal itu kami akan memberikan semacam diklat kepada pencari kerja mengenai keterampilan-keterampilan tertentu agar kelak mereka bisa diserap lapangan pekerjaan," ujarnya.

Tedi menjelaskan, keempat program unggulan tersebut merupakan upaya pihak Disnakertrans untuk mendongkrak angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut. Menurutnya, jumlah angka pengangguran sangat berpengaruh terhadap angka IPM sebab sebagai pengangguran tentu saja mereka tak memiliki penghasilan sehingga daya belinya sangat rendah. "Oleh karena itu, berbagai upaya untuk memperkecil angka pengangguran baik dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya maupun dengan meningkatkan SDM para pencari kerja, merupakan upaya Disnakertrans untuk mendongkrak angka IPM," jelasnya.

### Penyebarluasan Informasi Kerja

Program unggulan lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2017

ini adalah penyebarluasan informasi kerja kepada masyarakat Garut terutama para pencari kerja. Kegiatan ini di antaranya diwujudkan dengan membentuk rumah informasi kerja di kantor kecamatan. "Rumah informasi kerja yang sudah terbentuk sekarang ini sebanyak 10 rumah yang tersebar di 10 kecamatan. Nah para pencari kerja bisa mengunjungi rumah informasi kerja untuk melihat lowongan kerja yang tersedia," bebernya.

Selain itu, lanjut Tedi, untuk lebih menggenjatkan informasi kerja kepada masyarakat, upaya yang dilakukan Disnakertrans tak hanya membentuk rumah informasi kerja, bahkan juga menyebarluaskan informasi kerja melalui media massa. "Agar informasi kerja lebih sampai kepada masyarakat kami akan bekerjasama dengan media massa untuk memuat lowongan-lowongan kerja yang tersedia bagi warga Garut. Kegiatan ini kami lakukan sebab kami menyadari bahwa media massa lebih memiliki kekuatan untuk menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat. Oleh karena itu bekerjasama dengan

media massa kami berharap informasi mengenai lowongan kerja lebih cepat sampai kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa sesegera mungkin memanfaatkan informasi tersebut," katanya.

Menurut Tedi, program unggulan penyebaran informasi kerja kepada masyarakat baik lewat rumah informasi maupun media massa erat kaitannya dengan upaya untuk mendongkrak Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap lembaga yang dipimpinnya. "Kami ingin melayani masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok lembaga kami. Dan itulah yang kami berikan kepada masyarakat agar mereka puas dengan pelayanan kami," harapnya.

### Job Fair

Tedi membeberkan, masih terkait dengan penyebaran informasi kerja, dalam momentum Peringatan Hari Jadi Garut (HJG) yang ke 204 pihaknya menggelar job fair di arena pameran dengan membuka stand khusus. Kegiatan itu akan diikuti oleh 40 perusahaan yang ada di Jawa Barat yang akan menawarkan sejumlah lowongan kerja kepada masyarakat Garut. "Inilah kegiatan Amazaing Garut yang bisa dipersembahkan Disnakertrans. Alhamdulillah berkat kerja keras semua pihak, kami bisa membawa

puluhan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja untuk menyampaikan informasi lowongan kerja kepada warga Garut. Mudah-mudahan kegiatan job fair bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terutama yang membutuhkan pekerjaan," tuturnya.

Namun kegiatan job fair yang akan digelar oleh Disnakertrans rupanya tak akan berhenti hanya terbatas pada hajatan HJG saja, melainkan akan secara kontinyu dilakukan. Setelah job fair di HJG selesai, Disnakertrans kembali akan menggelar kegiatan bursa kerja, namanya Bursa Kerja Khusus. Tempatnya akan disebar di tiga wilayah.

"Setelah job fair terkait perayaan HJG digelar, kami pun akan melakukan kegiatan job fair lainnya bernama Bursa Kerja Khusus. Lokasinya akan dilakukan di tiga wilayah yakni di Garut Selatan, Garut Tengah dan Garut Utara. Dengan cara itu kami berharap informasi lowongan kerja diterima secara merata oleh masyarakat Garut di berbagai pelosok," katanya.

Berbeda dengan job fair pada perayaan HJG yang perusahaannya berskala Jawa Barat, lanjut Tedi, Bursa Kerja Khusus akan digelar di tiga wilayah tersebut hanya diikuti oleh perusahaan yang berasal dari Garut saja. "Jumlah perusahaan yang berpartisipasi sebanyak 10 perusahaan. Mereka akan

## Makna HJG ke-204

Harus menjadi momentum perenungan warga Garut agar kita bisa memaknai sejarah. Orang yang bisa menghargai sejarah adalah orang besar, dan menurut hemat saya penghargaan tersebut harus diwujudkan dengan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat banyak

H. Tedi, S.Sos., M.Si

menawarkan sejumlah lowongan kerja kepada para pencari kerja asal Garut," jelasnya.

Upaya lainnya dalam rangka mengurangi pengangguran, pihak Disnakertrans dengan dukungan beberapa kementerian akan menggelar kegiatan kampung TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Kementerian yang terlibat di antaranya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan beberapa BUMN.

"Kami akan membangun Kampung TKI bekerjasama dengan pemerintah pusat. Dalam kegiatan itu kami akan membina para mantan TKI agar memiliki keterampilan berwirausaha sehingga mereka tidak usah lagi pergi ke luar negeri dalam mencari nafkah. Keterampilan yang akan kami berikan kepada mereka berbagai macam jenis, bisa saja kuliner, otomotif dan sebagainya," katanya.

Menurut Tedi, program-program itu siap dilaksanakan di tahun 2017 dan diharapkan mempunyai dampak signifikan terhadap upaya penanggulangan pengangguran. "Namun tentu saja kami menyadari, tanpa kerjasama yang baik antara semua pihak, program-program itu tak akan terlaksana secara maksimal. Oleh karena kami berharap jajaran internal Disnakertrans bahu membahu menyukseskan program yang telah matang tersebut," katanya. (\*)



# Radio Intan Garut Kini Mulai Berbenah

**B**ila masyarakat pendengar radio di Kabupaten Garut pernah dininabobokan oleh suara penyiar pada tahun 80-an, maka yang akan teringat salah satunya adalah radio milik Pemerintah Kabupaten Garut. Dia adalah radio STURADA (Stasiun Radio Daerah) yang kemudian berubah nama Menjadi Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) yang dulu bermarkas di Jalan Parmuka.

Tahun 2000, kemudian berubah lagi menjadi Radio Intan FM yang mengudara pada frekuensi 90,3 MHz., yang kini keberadaannya di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut.

Radio Intan adalah media informasi dan hiburan yang dianggap sangat vital, apalagi masyarakat yang masih haus informasi, terlebih di daerah yang belum tersentuh dengan media cetak atau media website yang dimiliki Diskominfo hanya bisa dikonsumsi oleh kalangan tertentu.

Sebagai seorang koki baru di UPT Penyiaran (Radio Intan FM), Arimbo, seja awal tahun ini dipercaya untuk membenahi radio ini. Ia kini disibukkan dengan meramu program di radio yang bukan lingkungan asing bagi dirinya. Maka, dibenaknya mulai terbersit jiwanya untuk membantu mengimbangi berita-berita yang gencar di masyarakat dengan menggunakan frekuensi radio.

Untuk menjawab itu, Arimbo kini sedang membenahi infrastruktur di dalam. Mulai perbaikan tower pemancar, ruang siar, bahkan hal terkecil mulai dari perbaikan atap, plafon yang sudah bolong, genting

bocor menjadi santapan barunya sehari-hari.

Tentu saja program ke depan akan dikemas sedemikian rupa. Tidak hanya hiburan, namun program edukasi bagi masyarakat pun akan segera dibenahi. "Insya Allah kedepan lebih bagus. Walau sampai saat ini semua biaya harus kami tutupi, namun kami akan tetap berjalan meski didalamnya masih perlu pembenahan yang sangat banyak," ujarnya optimis.

Disela-sela perbaikan tower, Arimbo menuturkan, pihaknya sedang mencoba membenahi tower agar daya pancarnya bisa lebih bagus, sehingga tepat hari jadi ke-204 Kabupaten Garut pada tanggal 16 Februari nanti bisa mengudara dengan yang ditandai dengan membuka stand pameran di rangkaian Hari Jadi Garut sebagai bentuk sosialisasi. "Jadi masyarakat bisa mengetahui dari pagi sampai malam apa saja yang sedang dilaksanakan di pameran," katanya.

Selain itu sedang diupayakan persyaratan-persyaratan lain layaknya radio mengudara, sehingga menjadi tolok ukur radio radio yang ada di Kabupaten Garut.

Bila semua telah berjalan, program yang akan ditayangkan nanti diharapkan dapat

memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam penyebaran informasi. Apalagi sebagai daerah wisata membutuhkan guidance atau pemandu wisatawan melalui peran seorang penyiar, sehingga akan membantu kenyamanan wisatawan bertandang ke Garut.

"Bisa saja nanti wisatawan yang bertandang ke Garut membutuhkan tempat-tempat kuliner, atau objek wisata yang nyaman dan murah," ujarnya.

Selain itu, kedepan pihaknya akan mengundang berbagai SDKPD untuk menyosialisasikan programnya, sehingga masyarakat ikut terlibat dalam menyikapi program yang digulirkannya. (\*)



## Perda No. 9 Tahun 1981 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Garut



Pasal 1:

Lambang Daerah adalah suatu lukisan yang mempunyai bentuk tertentu dan terlukiskan nilai-nilai potensi alam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.

Pasal 2:

- (1) Bentuk dan ukuran Lambang Daerah ialah se buah perisai bersudut 3, bergaris tepi kuning tua yang merupakan bingkai dengan ukuran lebar 3 dan tinggi 4.
- (2) Lukisan :
  - a. Langit biru pada bagian atas perisai.
  - b. Bintang bersudut 5 warna kuning emas bersinar
  - c. Gunung, warna biru tua, berpuncak 5 yang menggambarkan Gn.Talagabodas, Gn. Cakrabuana, Gn. Cikuray, Gn. Papandayan, dan Gn. Guntur
  - d. Sungai, dilukiskan dengan 3 garis putih, yang menggambarkan 3 sungai besar di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, yaitu Sungai Cimanuk, Cikandang, dan Cilaki.
  - e. Gelombang laut, 2 buah garis berwarna biru laut menggambarkan batas Selatan Kabupaten Garut merupakan Samudera Indonesia yang bergelombang besar.
  - f. Hamparan berwarna hijau tua pada perisai bagian bawah menggambarkan keadaan tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut yang subur.
  - g. Sebuah Jeruk Garut, berwarna kuning jeruk yang merupakan hasil spesifik dari Kabupaten Daerah Tingkat II Garut yang disebut dimana-mana dengan sebutan Jeruk Garut.
- (3) Kelengkapan, berupa pita merah yang terletak di bawah menyangga perisai, kedua ujungnya terdapat lipatan dan tertulis huruf putih berbunyi "TATA TENG TREM KERTARAHARJA"







## Kabupaten Garut Kembali Raih Plakat Wahana Tata Nugraha

**W**akil Bupati dr. Helmi Budiman, menyoroti masalah marka jalan, petunjuk arah dan traffic light di wilayah perkotaan yang belum tertata dengan baik. Wabup kerap menerima keluhan dari warga serta para tamu dari luar dengan kurangnya arah petunjuk manakala memasuki gerbang kota Garut.

“Saya ingin tahun ini Dinas Perhubungan dapat menjawabnya”, tegasnya di hadapan peserta Apel Gabungan Pegawai di Lingkungan Pemkab Garut, Senin (6/2/2017), bersamaan penyerahan sertifikat dan plakat penghargaan Wahana Tata Nugraha, sebuah penghargaan atas Penilaian Kinerja Sistem Informasi Transportasi Perkotaan Tahun 2016. Penerimaan penghargaan ini merupakan yang ketiga bagi Kabupaten Garut.

Wakil Bupati mencontohkan masih belum terpasangnya traffic light di pertigaan jalan Ciateul, dan rambu arah petunjuk yang masih kurang, padahal hal itu berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan. Belum lagi permasalahan marka jalan yang belum seluruhnya terpasang. “Saya harap agar tahun depan kita dapat meraih piala, bukan lagi plakat. Itupun harus ditunjukkan dengan perbaikan dan perubahan layaknya sistem transportasi perkotaan”, ujar Helmi menambahkan.

Wakil Bupati Helmi Budiman menyerahkan langsung plakat dan sertifikasi Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan RI kepada Kepala Dinas Perhubungan DR. H. Suherman Mustofa, SH, MH., disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut H. Iman Alirahman, SH., M.Si. (\*)

# KPK Lakukan Ekspose di Hadapan Bupati Garut

66  
Proses-prosesnya harus dilakukan transparan, misalnya, yang namanya pengurusan apapun kalau itu nol rupiah ya disampaikan nol rupiah



Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan seluruh SKPD agar memiliki website yang berbasis online guna memudahkan pelayanan masyarakat yang membutuhkan pelayanan perijinan baik itu akte kelahiran, KTP, dan lain-lain yang terintegrasikan di Diskominfo.

Anggota Tim KPK, Tri Budi, disela-sela Ekspose KPK di Bappeda, Rabu (8/2/2017), mengatakan, seharusnya transparansi ini dikuatkan dengan adanya pelayanan berbasis online, sehingga si pengguna lain itu mengetahui berapa lama

pelayanan itu diberikan, walaupun ada restribusinya, kita akan mengetahui prosesnya. "Kemudian dilihat in tracking, jadi masyarakat tidak

harus datang ke tempat pelayanan, masyarakat jadi tahu kapan itu selesainya".

Ia menyarankan agar pelayanan yang selama di Disdukcapil itu semua ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga dinas tersebut tidak perlu lagi berhubungan lagi ke pengguna layanan.

"Proses-prosesnya harus dilakukan transparan, misalnya, yang namanya pengurusan apapun kalau itu nol rupiah ya disampaikan nol rupiah. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah sanksi yang jelas terhadap pegawai kalau memang diduga menerima materi pungli dan sebagainya", tegasnya

Bupati Garut H. Rudy Gunawan, menuturkan sistem dan cara berbasis online sudah selayaknya disosialisasikan kepada masyarakat supaya mereka mengerti bagaimana caranya mempergunakan berbasis online, sehingga masyarakat tidak usah datang ke tempat pelayanan publik, apalagi masyarakat yang jauh akan menghabiskan uang dan waktu untuk bisa mendapatkan sebuah KTP, atau Akte Kelahiran.

Menyinggung masalah ASN (Aparatur Sipil Negara), bupati menegaskan bila ada yang pungli di luar tidak sesuai yang ditetapkan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku atau diberi sanksi. (\*)

# Garut Gencar Ubah Kebiasaan Perilaku Tidak Sehat Masyarakat



**B**upati Rudy Gunawan terus menggulirkan program guna mengentaskan perilaku tidak sehat masyarakat. Salah satunya adalah dengan program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

Guna memaksimalkan program tersebut Bupati melakukan Deklarasi Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan/Open Defecation Free (ODF) di Lapangan Kaak Desa Sukanegla Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jumat (10/02/2017), melibatkan lurah. Bupati mengapresiasi terhadap jerih payah aparatur Puskesmas Pasundan, kelurahan

dan kecamatan yang berhasil menggerakkan masyarakat, sehingga bisa meninggalkan kebiasaan buruk BAB (Buang Air Besar) sembarangan, meski terlihat sepele, namun masalah BAB tersebut merupakan hal penting karena menyangkut masalah kesehatan masyarakat.

“Saya mempunyai perhatian khusus pada ODF atau menjaga melaksanakan kehidupan yang sehat. Jadi ini bukan hanya kewajiban pemerintah tetapi kewajiban seluruh masyarakat. Karenanya kita akan mendorong program STBM Sanitasi Total berbasis Masyarakat. Pemerintah hanya memberikan pemicu sarana dan prasarana semuanya ditentukan oleh masyarakat sendiri,” ujar Bupati.

Senada dengan Bupati, Camat Garut Kota Bambang Hafidz mengutarakan jika masalah sanitasi ini bukan hanya menyangkut sarana dan prasarana tetapi masalah kebiasaan. Karenanya ia mengapresiasi semangat masyarakat yang juga ingin berubah sehingga bisa mengupayakan ODF secara

swadaya.

“masyarakat begitu antusias berswadaya untuk menggali dan menyediakan sefty tank untuk merobohkan dan menghilangkan pacilingan-pacilingan yang ada. Dan itu bukan hal yang mudah karena itu bukan hanya menyangkut prasaran tetapi menyangkut perilaku. tetapi sekarang masyarakat sSukanegla berkomitmen untuk tidak ada lagi warga yang buang air besar sembarangan,” papar Camat.

Deklarasi ODF ini juga mendapat respon positif dari masyarakat, salah satunya Ishak. Menurutnya dengan adanya program ini masyarakat yang semula BAB di selokan atau di kebun sekarang sudah mulai berubah. “Sekarang hampir semua rumah warga di RT saya sudah memiliki sefty tank. Kalau dulu untuk BAB masih di selokan. Alhamdulillah sekarang setelah ada program dari Bupati dan setelah diarahkan oleh Puskesmas semua sudah memiliki Septic tank,” ujar Ishak ketika di sela-sela acara.

Bupati kerap mengucapkan, akan memfungsionalkan pejabat yang tidak peduli terhadap program desa ODF. Untuk itu ia berharap agar program ini berjalan, selain untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat, juga untuk mewujudkan Garut Sehat dan desa yang bebas buang air besar sembarangan.

Tahun 2017 Kabupaten Garut menargetkan 300 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Garut dinyatakan desa ODF. (\*)





## Diskominfo Terima Kunjungan Mahasiswa Universitas Andalas

“  
Untuk mengantisipasi itu, maka peran pemerintah mewadahi komunitas-komunitas telematika, sehingga secara tidak langsung menyebarkan virus-virus kebaikan, yang berdampak terhadap penyalahgunaan media dunia maya. “Kami perbanyak kegiatan inovatif dalam rangka memfasilitasi hobi mereka. Biasa dari situ muncul ide-ide kreatif

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Selasa (7/2/2017) mendapat kunjungan mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Rombongan yang diketuai Dr. Emeraldy Chatra, M.Ikom diterima langsung Sekretaris Diskominfo, Drs. Diar Cahdiar, M.Si, di Ruang Media Center.

Menurut Dr. Emeraldy Chatra, M.Ikom, rombongan mahasiswa sebanyak 18 orang sengaja datang ke Kabupaten Garut untuk menggali sebanyak-banyaknya mengenai pengelolaan opini publik dan kehumasan. Menurutnya program magister yang ada di Universitas Andalas memiliki tujuan menghasilkan Sarjana Magister Ilmu Komunikasi yang memiliki kompetensi untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi khususnya public relations dan media studies melalui pengajaran dan penelitian di berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya.

Tanya jawab antara mahasiswa dengan Sekretaris pun muncul, dari mulai meredam informasi hoax, pengendalian dan pengawasan, pornografi hingga masalah hacker.

Diar Cahdiar dengan diplomatis menjawab bahwa persoalan informasi hoax bukan sesuatu yang dikeluhkan sebagian masyarakat Garut, karena karakter masyarakatnya yang lebih mengedepankan keterbukaan, sehingga tidak mengendap dan menimbulkan informasi palsu. Meski demikian, pihaknya berupaya agar hoax tidak terjadi. Caranya, mengedepankan komunikasi dan informasi yang jelas dan transparan.

Berkaitan dengan pornografi, dijawab Diar sebagai dampak negatif yang dirasakan sangat berat. Dia menilai masalah itu diibaratkan sebagai adu pinter antara pemerintah dan pemakai media teknologi cyber. “Kenyataan ini seolah mereka tidak mau ditaklukkan,” ujar Diar.

Untuk mengantisipasi itu, maka peran pemerintah mewadahi komunitas-komunitas telematika, sehingga secara tidak langsung menyebarkan virus-virus kebaikan, yang berdampak terhadap penyalahgunaan media dunia maya. “Kami perbanyak kegiatan inovatif dalam rangka memfasilitasi hobi mereka. Biasa dari situ muncul ide-ide kreatif.

Azwar Emeraldi, secara khusus mengapresiasi Diskominfo yang telah berperan, sehingga banyak karya-karya yang bagus dan inovatif. Meski demikian ia mengkhawatirkan persoalan teknologi menumbuhkan perbedaan persepsi masyarakat diakibatkan oleh perbedaan intelektual, termasuk dengan hoax yang bisa merusak kepercayaan masyarakat dan pemerintah. (\*)

# Kabupaten Garut Bertekad Kejar Ketertinggalan dalam Bidang Kesehatan



Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kini Puskesmas mendapat perhatian lebih pada program pembangunan di Kabupaten Garut. Maka tak heran, sarana prasarana dan standar pelayanan di seluruh Puskesmas di Kabupaten Garut kini terus ditingkatkan. Diantaranya, Puskesmas Pasundan Kecamatan Garut Kota dan Puskesmas Sukakarya Kecamatan Samarang.

Bupati Garut Rudy Gunawan, Kamis (26/01/2017), meresmikan dua Puskesmas tersebut. Puskesmas Pasundan penggunaannya sebagai gedung baru yang selama ini kondisi kurang ideal untuk ukuran Puskesmas, sedangkan Puskesmas Sukakarya mengalami peningkatan sarana Gedung Rawat Inap.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Tenni Swara Rifai, dengan ditingkatkan sarana puskesmas, diharapkan Puskesmas ini menjadi unit persalinan One Day

Care atau unit pertolongan persalinan sebagai andalannya.

Selain menjadikan unit persalinan One Day Care sebagai andalannya Puskesmas Pasundan juga dilengkapi

dengan berbagai sarana dan prasarana yang mumpuni dan lengkap. Unit pelayanan kesehatan lain selain persalinan ada Unit Kegawat Daruratan, layanan pemeriksaan umum, KIA, KB, gigi mulut dan laboratorium dasar. Sedang unit persalinan One Day Care setiap harinya telah melayani pasien tidak kurang dari 1 orang.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengapresiasi peningkatan pelayanan kesehatan yang terus digenjut. Karena di awal kepemimpinannya Garut sempat menduduki peringkat 26 dari 27 kab/kota di Jawa Barat dalam

penilaian IPM. Kemudian dalam perkembangannya Garut bisa meningkat dan bersiap untuk mengejar ketertinggalan.

“Saya berharap jajaran dinas kesehatan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya program-program yang bisa meningkatkan IPM. Angka kematian ibu dan bayi itu dihitung, jadi kalau kita semua bisa berkomitmen Insya Allah tahun depan kita bisa mengalahkan Indramayu dan Sukabumi, karena kita itu cuma beda 5 angka dengan nilai rata-rata Jawa Barat. Jadi kita semua harus mengejar ketertinggalan,” kata bupati optimis

Di bagian lain bupati telah memprogramkan pembangunan kantor-kantor kecamatan sebesar Rp 30 milyar. “Saat ini akan segera dibangun kantor Kecamatan Leles dan Samarang, termasuk Pasar Samarang akan dibangun dua lantai,” pungkasnya.

Puskesmas Sukakarya sendiri, seperti dituturkan, Kepala UPT Een Sumiati, Amd.Kep.Skm., telah memiliki dengan 70 Posyandu dan 345 kader, sehingga potensi ini dapat membantu 7 desa. (\*)





## Wabup Resmikan Puskesmas Sukarame

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Wakil Bupati Garut dr. H. Helmi Budiman meresmikan penggunaan gedung baru Puskesmas Sukarame, Kamis (09/02/2017).

Puskesmas Sukarame kini merupakan Puskesmas rawat inap di Kecamatan Caringin yang dilengkapi dengan pelayanan Obstetri Neonatus Esensial dasar (Poned) perawatan mampu. Pembangunan gedung baru Puskesmas Sukarame dengan berbagai fasilitas kesehatan menghabiskan dana senilai Rp 810.070.000 anggaran APBN.

Dalam acara tersebut dihadiri pula oleh para unsur muspika Kecamatan Caringin, Sekretaris Ko-misi D, Perwakilan Dinkes Garut, Para kepala UPT Puskesmas Caringin serta para undangan lainnya.

Dalam sambutannya Wabup berharap fasilitas ini mampu meningkatkan kualitas kesehatan di kecamatan caringin pada khususnya.

“Adanya gedung baru ini diharapkan setiap warga Kecamatan Caringin memiliki jaminan kesehatan semua

masyarakat mendapatkan kesempatan dan hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima,” tegas Wabup.

Lebih Lanjut Wabup, Mengapresiasi dan berterima kasih atas terselenggaranya peresmian Puskesmas Sukarame ini, dia berharap jajaran Dinas Kesehatan khususnya bagi petugas Puskesmas harus lebih bersemangat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Semoga Puskesmas ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata wabup.

Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas Sukarame Rudani S.Kep dalam sambutannya melaporkan terkait pembangunan Puskesmas Sukarame. “Wilayah kerja Puskesmas Sukarame meliputi 6 desa yang dilengkapi dengan 47 orang tenaga kesehatan,” ujarnya.

### Operasi Katarak Gratis

Sebanyak 150 warga kurang mampu yang berasal dari 5 kecamatan di Kabupaten Garut dan luar Kabupaten yaitu Cidaun Kabupaten Cianjur, menjalani

operasi mata katarak gratis yang dilaksanakan di Puskesmas Sukarame Kecamatan Caringin, Kamis (09/02/2017) pagi. Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman, mengatakan program rutin operasi katarak yang ke-7 kalinya ini merupakan hasil kerja sama Pemkab, Perdami Jawa Barat serta Yayasan Muslim Asia (AMCF).

“Operasi katarak ini juga merupakan serangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Jadi Garut yang ke-204,” kata Wabup

Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Komisi D DPRD Garut, Dinkes yang diwakili oleh kepala bidang, unsur muspika Kecamatan Caringin beserta tokoh dan para Kepala UPT Puskesmas dari 8 Kecamatan.

Wabup pun mengucapkan banyak terima kasih ke semua pihak yang terkait sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses, dan berharap untuk kedepannya bisa terlaksana kembali kegiatan bhakti sosial ini di seluruh kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Garut .

“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Garut untuk senantiasa membiasakan hidup sehat dengan cara berolahraga secara rutin,” pungkasnya. (\*)



# Siapkan Kawasan Industri Genjot Investasi

**B**upati Garut Rudy Gunawan mengakui proses investasi di daerahnya lamban. Kelambananan ini diduga karena kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dianggap tidak adil dan cenderung menginginkan Garut untuk tidak mengembangkan dan membuka diri seluas-luasnya bagi para investor.

Alasannya sangat subjektif, bila Garut dibuka, dikhawatirkan investor lari semua ke Garut. Alasannya karena UMK Garut rendah. Untuk itu ia berharap, pemimpin Jawa Barat kedepan harus memiliki jiwa wirausaha agar tidak ketinggalan dari daerah lain.

Hal itu diungkapkan Bupati Rudy, dalam Seminar Investasi bertema "Peran Strategis Akademisi dalam Mendorong Investasi Guna Meningkatkan

Pertumbuhan Daerah", digagas Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Garut bekerjasama Bank bjb dan Universitas Garut, diikuti 100 orang peserta, di Aula Uniga,



Senin (30/1/2017).

Bupati menegaskan, Pemkab Garut telah membidik lima kecamatan di Kabupaten Garut untuk dijadikan kawasan industri, yakni Kecamatan Leles, Balubur Limbangan, Selaawi, Malangbong, dan Cibatu. "Untuk itu kami saat

ini mengusulkan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011-2030," ujarnya. Bupati mengklaim, untuk mendukung itu, pihaknya sedang menyiapkan 50 ribu hektar untuk dijadikan kawasan industri.

Meski demikian Rektor Universitas Garut mengingatkan, investasi hendaknya dibarengi kesiapan skill SDM, belum persoalan inovasi bila investasi menginginkan kesinambungan.

Sementara itu Ketua KADIN Jabar, Agung Suryamal Sutisno, mengatakan, kini pihaknya tengah mendorong konsep pembukaan industri ke wilayah timur agar tidak terjadi ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi. "Wilayah selatan seperti Garut dimungkinkan pula merasakan dampak ekonomi sosial, manakala jalan tol Bandung-Garut-Tasikmalaya dibuka," ujar Agung.

Seminar Investasi menyepakati, persoalan investasi harus didukung SDM yang mumpuni, didukung peran pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan yang mempermudah investasi. Pertumbuhan ekonomi daerah berhasil bila ada sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan akademisi yang mencetak SDM.

Seminar, menurut Ketua KADIN Garut, H. Deden Sofyan, bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan utuh mengenai prospek investasi di Kabupaten Garut, sehingga menarik para calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Garut. (\*)

# DAS Cimanuk Hulu dan DAS Citarum Hulu Harus Segera Ditangani



Ir. H. Deni Suherlan, M.Si

“

Untuk Kegiatan RHL konvensional di dalam kawasan hutan, dilaksanakan melalui penugasan khusus kepada Perum Perhutani dengan mengacu kepada Perpres Nomor 89 Tahun 2007, sedangkan kegiatan RHL dengan sistem aerial seeding dilaksanakan secara kontraktual

**D**ipimpin Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Penanganan Pasca Bencana Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk Hulu dan DAS Citarum Hulu mencapai kesepakatan yang mengarah kepada perlu segera ditanganinya DAS dengan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Ir. H. Deni Suherlan, M.Si, yang turut hadir dalam Rakor Tindak Lanjut Penanganan Pasca DAS Cimanuk Hulu dan DAS Citarum Hulu, di Gedung Sate, Bandung, pada tanggal 11 Januari 2017 lalu, mengutarakan kegiatan RHL di luar kawasan hutan dilaksanakan secara swakelola melalui Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) kepada kelompok masyarakat dengan melibatkan penyuluh kehutanan, unsur TNI (Babinsa) dan unsur Polri (Babinkamtibmas) sebagai pendamping di lapangan dan Perguruan Tinggi sebagai Tim Penilai Hasil Kegiatan. “Apabila swakelola tidak dapat

dilaksanakan maka dilaksanakan dengan skema kontraktual”, tegas Deni.

Untuk Kegiatan RHL konvensional di dalam kawasan hutan, menurut Deni Suherlan, dilaksanakan melalui penugasan khusus kepada Perum Perhutani dengan mengacu kepada Perpres Nomor 89 Tahun 2007, sedangkan kegiatan RHL dengan sistem aerial seeding dilaksanakan secara kontraktual.

Sementara itu jumlah tanaman per hektar untuk kegiatan RHL intensif berjumlah 833 batang/hektar dengan jarak tanam 4 meter x 3 meter dengan tingkat keberhasilan 701 batang/hektar, dan agroforestry sebanyak 500 batang/hektar dengan jarak tanam 4 meter x 5 meter dengan tingkat keberhasilan masing-masing 90 % pada tahun ketiga atau 400 batang/hektar.

Menurut Deni mengutip pernyataan Gubernur Jawa Barat, menginstruksikan Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum Ciliwung dan BPDASHL

Cimanuk Citanduy untuk segera membentuk tim menyusun Rancangan Teknis dengan melibatkan Dinas Kehutanan Jawa Barat, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa barat dan Perhutani.

Penanganan Cimanuk Hulu harus segera dilaksanakan pada awal tahun 2017 melalui APBN dengan biaya sebesar Rp 257.003.350.000, termasuk untuk Citarum Hulu dengan proporsi disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

Penanganan RHL di dalam kawasan hutan meliputi reboisasi aerial seeding 5.400 ha dan konvensional 1.000 ha. Sedangkan di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain/APL) di arahkan untuk Hutan Rakyat/Gerhan seluas 3.000 ha.

Sedangkan untuk bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) diarahkan untuk pembuatan DAM sebanyak 270 unit, gully plug sebanyak 915 unit dan sumur resapan air sebanyak 3.050 unit.(\*)



## KPU Targetkan Partisipasi Pemilih 80 Persen

**K**omisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada 2018 nanti sebesar 80 %. Target itu mesti ditunjang dengan sosialisasi yang gencar.

Demikian keterangan Ketua KPU Kabupaten Garut, Hilwan Fanaqi, S.IP, di Ruang Media Center Dinas Kominfo Kabupaten Garut, dalam acara kunjungannya di Dinas Kominfo Kabupaten Garut, Rabu (18/1).

Ketua KPU didampingi komisioner dari Divisi Hukum Reza Alwan Sovnidar, bersama empat orang staf dari Sekretariat KPU, diterima langsung Kepala Dinas Kominfo, H. Nurdin Yana.

Hilwan menjelaskan, pemilihan kepala daerah di Kabupaten Garut dan 15 daerah lainnya akan bersamaan dengan pemilihan Gubernur Jawa Barat, dimana tahapannya diperkirakan akan dimulai bulan Juni 2018. Maka dengan pilkada serentak nanti, konsekuensi yang timbul adalah pendanaan bersama antara kabupaten dan Provinsi Jawa

Barat.

Hilwan didampingi Reza Alwan Sovnidar mengkalim, pihaknya telah melakukan sosialisasi di beberapa tempat. "Sosialisasi sudah dilakukan, tinggal 15 kecamatan di daerah selatan yang belum terjangkau, mengingat

Diskominfo dapat membantu KPU yang saat ini masih kekurangan tenaga IT (teknologi informasi). Kedepan diseminasi informasi dapat dilakukan bersama secara masif guna mendongkrak tingkat partisipasi pemilih sebesar 80 %

anggaran yang terbatas. Tahun ini, Insya Allah sisanya akan kami lakukan", tegasnya.

Dibagian lain Hilwan mengatakan, pihaknya selain berkunjung ke Diskominfo, juga

melakukan hal yang sama ke Badan Kesbangpol. Hilwan mengibaratkan Kesbangpol sebagai sponsor utama dalam perhelatan pilkada nanti, sedangkan Diskominfo diibaratkan sebagai penunjang utama.

Untuk itu ia berharap Diskominfo dapat membantu KPU yang saat ini masih kekurangan tenaga IT (teknologi informasi). Kedepan diseminasi informasi dapat dilakukan bersama secara masif guna mendongkrak tingkat partisipasi pemilih sebesar 80 %.

Sementara itu Reza Alwan Sovnidar selaku Komisioner Bidang Hukum menambahkan sosialisasi yang gencar dilakukan sebagai upaya menekan tingkat kerawanan dalam pilkada nanti yang berujung gugatan seperti dialami pilkada terdahulu dengan 27 gugatan.

Kepala Dinas Kominfo, H. Nurdin Yana, dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kunjungan KPU di Dinas Kominfo. Ia berjanji akan membantu KPU, sebagai wujud tanggung jawab seperti diamanatkan Undang-Undang Pemilu. (\*)

# Bupati Kukuhkan Tim SABER PUNGLI Kab. Garut

**D**itengah semangat pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo yang tengah memerangi pungutan liar dalam pelayanan publik, Kabupaten Garut merespon cepat dengan membentuk Tim SABER PUNGLI (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar). Tim SABER PUNGLI ini dikukuhkan langsung oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan dalam Apel Gabungan di Lapangan Setda Garut, Senin (16/01/2017).

Menurut Bupati tugas Tim ini memiliki peranan penting, terlebih ditengah pencapaian yang telah diraih oleh Kabupaten Garut. Karena pada tahun 2014 Garut masih tercatat sebagai kabupaten terendah. Tetapi pada tahun 2016 terjadi peningkatan terutama dalam hal pelayanan publik dimana menurut Ombudsman RI Garut menempati posisi kedua Kabupaten terbaik di Propinsi Jawa Barat dalam pelayanan publik. Karenanya Tim SABER PUNGLI berperan untuk menjaga agar pelayanan publik tetap meningkat dan sesuai



dengan peraturan.

“Tahun 2016 Kabupaten Garut mengalami kenaikan 49 point menjadi 74 point dalam pelayanan publik, sehingga Pada tahun 2016 Kabupaten meraih



rangking ke dua se-Propinsi Jawa Barat. Itu dalam segi administrasi dan komitmen kita, tetapi dalam hal memberikan pelayanan publik, Bapak Presiden RI masih menganggap disemua tingkatan pelayanan kepada masyarakat masih ada biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat diluar biaya resmi. Itulah yang dimaksud dengan pungutan liar yang seharusnya dipungut menjadi dipungut, yang seharusnya biaya rendah menjadi tinggi. Untuk itulah SABER PUNGLI tingkat Kabupaten Garut dibentuk dalam rangka menegakan hukum apakah dalam pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh aparatur pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak,” tegas Bupati dalam pidatonya.

Tim SABER PUNGLI Kabupaten Garut yang ditetapkan dalam SK Bupati No. 700/Kep.04-insp/2017 ini memiliki tugas inti memberantasan pungutan liar dengan menjalankan fungsi intelejen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Kemudian Tim memiliki kewenangan diantaranya untuk membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar,

melakukan pengumpulan dana dan informasi dari instansi penyelenggara pelayanan publik dan pihak lain yang dengan menggunakan teknologi informasi, melakukan operasi tangkap tangan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan sanksi bagi pelaku pungli.

Sedang untuk susunan Tim SABER PUNGLI diantaranya terdiri dari Penanggung Jawab oleh Bupati dengan didampingi 4 Wakil Penanggung Jawab yang terdiri dari Kapolres Garut, Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. Kemudian Ketua Pelaksana dijabat oleh Wakapolres Garut dengan dua wakil yaitu Inspektur Kab. Garut dan Kasi Intek Kejaksaan Negeri Garut yang terdiri dengan bidang Operasi, Logistik, Administrasi Umum dan dan Keuangan. Sedang Untuk Kelompok kerja terdiri dari Unit Intelejen yang diketuai oleh Kasat Intelkam Polres Garut, Unit Pencegahan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Garut, Unit Penindakan oleh Kasat Reskrim Polres Garut dan Unit Yustisi oleh Kasatpol PP Garut. (\*)



# Warga Cipansor Nikmati Sarana Air Bersih Siap Minum

**M**asyarakat Kp. Cipansor RW 15 Kel. Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut kini bisa menikmati sarana air bersih bahkan langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu. Karena Kp. Cipansor telah mendapat bantuan pengolahan air

Ultrafiltrasi dari Tim Penggerak PKK Kab. Garut yang sangat peduli terhadap pentingnya kebersihan di masyarakat.

Wakil Bupati, Helmi Budiman yang meresmikan sarana pengolahan air tersebut sangat mengapresiasi perhatian yang diberikan kepada masyarakat Kp. Cipansor. Ia mengharapkan dengan adanya fasilitas air bersih ini bisa merubah perilaku masyarakat, terlebih dengan kondisi masyarakat Cipansor sehingga tidak hanya menjaga kebersihan tetapi bisa semakin taat dan patuh pada aturan yang digulirkan oleh pemerintah.

"Setelah diberikan bantuan ini harus digunakan, dimanfaatkan dan dipelihara. Jadi toilet atau WC ini harus digunakan dan dimanfaatkan karena dari gambar desainnya sudah sangat bagus. terlebih masyarakat Kp. Cipansor ini merupakan masyarakat yang agamis, karenanya harus taat kepada ulama taat kepada pemerintah dan itulah realisasi taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Jadi kedepan untuk BAB jangan ke kebun tetapi harus ke WC dan ditampung di septic tank," ujar Wabup saat meresmikan sarana pengolahan air bersih pada hari Selasa (07/02/2017).

Selain memberikan bantuan pengolahan air, Ketua Tim PKK Diah Kurniasari didampingi oleh Wakil Ketua Tim PKK Hani Firdiani memberikan bantuan karpet dan buku untuk madrasah di Kp. Cipansor. Menurut Camat Tarogong Kidul, Lilis Neti beberapa bantuan lain seperti WC umum, sumur bor serta septic tank berasal dari bantuan lembaga diantaranya Alumni UI dan ITB serta dari perorangan yang peduli terhadap pentingnya menjaga kebersihan terutama sarana air bersih.

"Kami telah menerima beberapa bantuan diantaranya dari ibu ketua penggerak PKK berupa mesin ultrafiltrasi dan karpet. kemudian MCK, sumur Bor dan sefty tank dari SMA 3 Bandung," terang Lilis dalam acara yang dihadiri oleh segenap Muspika Kecamatan Tarogong Kidul. (\*)



# Ratusan Petugas Parkir Kini Memiliki Jaminan Kecelakaan dan Kematian

**S**ebanyak 519 petugas parkir di Kabupaten Garut kini memiliki jaminan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Jaminan dimaksud adalah jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

Wakil Bupati Garut dr. Helmi Budiman menyambut positif dengan diberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, karena selama menjadi wakil bupati, dirinya baru kali ini petugas lapangan seperti petugas parkir mendapat jaminan dari BPJS. "Saya berharap hal seperti ini diikuti SKPD lainnya, terutama bagi para pekerja lepas", tegasnya di hadapan peserta apel gabungan pegawai di lingkungan Pemkab Garut, Senin (6/2/2017). Pemberian jaminan itu ditandai dengan serahkannya secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 10 orang petugas parkir.

Menurut Helmi, salah satu penanggulangan sosial adalah memperhatikan perlindungan sosial seluas-luasnya. Bila hal ini diabaikan dikhawatirkan orang miskin semakin merasa miskin karena adanya pengabaian. Padahal bila perlindungan sosialnya diperhatikan, mereka akan merasa ada yang memperhatikan. "Ini yang paling



berat semenjak saya menjadi wakil bupati, maka ini harus dijiwai oleh seluruh aparatur," tegasnya.

Sementara itu Kepala BPJS Cabang Garut, Andri Rudiantara, menyatakan, dengan keikutsertaan ratusan petugas parkir tersebut otomatis mereka mendapat jaminan BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan dan kematian. Dimana setiap bulannya peserta BPJS Ketenagakerjaan dibebani iuran sebesar Rp 9.649.

Ke 519 petugas parkir itu terdiri dari TKK (Tenaga Kerja Kontrak) 4 orang, TKS (Tenaga Kerja Sukarelawan) 40 orang, Juru Parkir

Perkotaan 346 orang, dan Juru parkir UPTD Wilayah I hingga Wilayah VIII 129 orang.

Selain penyerahan Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Wakil Bupati disaksikan Kepala BPJS Cabang Garut Andri Rudiantara dan Sekretaris Daerah H. Iman Alirahman, SH, M.Si dan Kepala Dinas Perhubungan DR. H. Suherman Mustofa, SH, MH. menyerahkan santunan kematian kepada keluarga almarhum Asep (sopir pada warga Koperasi Organisasi Angkutan Darat – ORGANDA Cabang Garut) sebesar Rp 24 juta yang diterima langsung istri almarhum. (\*)





# Bupati Garut Ajak Kader NU Bersama-Sama Menciptakan Kenyamanan



gedung ini berguna bagi kepentingan dakwah, semoga bermanfaat untuk melakukan pelayanan kepada umat," ungkapnya.

Menurut Ketua Panitia Pembangunan Gedung, Rd. A. Kosasih, gedung ini telah berdiri dengan megah semula ditaksir akan menghabiskan biaya mencapai Rp 1,4 milyar, namun kenyataannya menyerap biaya sebesar Rp 760 juta lebih. Ia berharap dengan berdirinya gedung ini sebagai sarana silaturahmi dan pelayanan bagi warga NU, sehingga NU selalu berperan serta menjaga keutuhan NKRI.

Turut hadir dalam peresmian Sekda H. Iman Alirahman, Dandim 0611 Leko. Setyo Hani, Danrem 062 Tarumanagara, Kepala BNN Kabupaten Garut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, para pengurus dan kader NU se-Kabupaten. (\*)

**B**upati Garut Rudy Gunawan mengajak semua Kader Nahdhatul Ulama (NU) untuk bersama-sama menciptakan kenyamanan di kota Garut, karena seperti hadirnya pondok-pondok pesantren berbasis NU di Garut setidaknya bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat. "Semoga semua amaliah NU menjadi amal shaleh di akhirat nanti", katanya.

representatif sebagai simbol yang dikelola dengan baik, apalagi kantor merupakan simbol identitas kita.

"Tiga tahun yang lalu saya awal-awal jadi bupati saya di undang kesini untuk peletakan batu pertama dan alhamdulillah setelah tiga tahun saya menjabat saat ini telah berdiri gedung PC NU Kabupaten Garut. Insha Alloh

Ajakan Bupati Rudy disampaikan saat meresmikan Gedung Hijau Pangcalikan sebagai Kantor Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Garut, berlokasi di Jalan Suherman Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler.

Berkaitan dengan peresmian gedung, Bupati Rudy menyatakan rasa bangganya karena ormas islam terbesar di Indonesia ini telah memilki gedung megah dan





## Dua Tugas Pokok MUI

Beberapa waktu lalu sempat muncul isu bahwa hubungan Bupati Garut dengan sejumlah ulama kurang harmonis. Ternyata isu itu sangat tidak benar.

Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut, KH. Sirojul Munir, hubungan antara ulama dengan Bupati termasuk jajaran Pemkab sekarang ini sangat bagus. Hal itu ditandai dengan semakin intensnya hubungan koordinasi antara MUI dengan Pemkab Garut belakangan ini.

Koordinasi yang bagus tersebut bukan hanya terjalin dengan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda tapi seluruh jajaran Muspida Kabupaten Garut dan semua pihak.

"Dalam rangka memajukan Garut dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat Garut, MUI selalu duduk bersama dengan Bupati serta jajarannya serta seluruh muspika minimal sebulan sekali untuk melakukan koordinasi. Jadi kami sangat merasakan kebersamaan dalam rangka membangun Garut sesuai dengan tugasnya masing-masing," katanya.

Kyai yang akrab disapa Ceng Munir ini memaparkan, MUI dengan jajaran pemerintahan bukan hanya sebatas melakukan koordinasi secara intens, melainkan juga sering terlibat melaksanakan kegiatan secara bersama-sama. "Hal itu dilaksanakan terutama jika ada hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat dari

berbagai sisi, baik dari sisi keagamaan, keamanan, pemerintahan dan sebagainya. Jadi intinya, hubungan koordinasi antara MUI dengan Pemkab termasuk dengan jajaran pemerintahan di Kabupaten Garut sekarang ini terjalin



KH. Sirojul Munir

sangat baik," ungkapnya.

Pemkab pun sangat respon terhadap program kerja MUI dan selalu memberikan dukungan. Bahkan MUI kerap dilibatkan dalam berbagai kegiatan untuk memberikan pengarahan keagamaan di berbagai dinas di antaranya Disperindag, Disdik, dan Kesbang.

Dicontohkannya, keterlibatan MUI dalam pengarahan di Disdik di antaranya memberikan pembinaan terhadap para kepala SLTA dan SMP tentang bagaimana peran agama Islam terhadap pembangunan negara dan hubungan Islam dengan negara

itu sendiri.

"Jadi di dalamnya ada materi tentang wawasan kebangsaan menurut Islam," paparnya.

Hal itu dilakukan karena sekarang ini di Garut terindikasi ada kegiatan-kegiatan yang kurang sesuai dengan ajaran Islam yang dilakukan di lingkungan segelintir sekolah di antaranya mengajarkan tindakan makar. "Kami tak akan menyebutkan sekolah tersebut karena sesuatu dan lain hal," katanya.

Ceng Munir bersyukur, berkat tindakan cepat dari pemerintah dengan didukung berbagai pihak, persoalan itu kini telah teratasi.

### Turun ke Lapisan Bawah

Menurut KH. Sirojul Munir, di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang sekarang ini berlangsung dengan ditandai oleh berseliwerannya faham dan suhu politik yang memanas, maka MUI memandang perlu segera dilaksanakan suatu upaya untuk lebih memantapkan pemahaman umat atau masyarakat tentang Islam yang benar. Maka berdasarkan hasil Musyawarah Kerja MUI tahun 2017 yang baru saja dilaksanakan, mulai bulan Maret, MUI akan terjun langsung memberikan pembinaan keagamaan terhadap masyarakat. "Kegiatan tersebut akan didukung pula oleh jajaran pemerintahan baik dari Pemkab, Polres, Kodim dan Kejaksaan," katanya.

MUI akan memberikan pembinaan dan pencerahan terhadap masyarakat tentang ajaran Islam yang benar. Hal ini sangat penting mengingat sekarang banyak berkembang pihak-pihak yang mengatasnamakan Islam namun sesungguhnya tak sesuai dengan ajaran Islam. "Dalam kegiatan itu tentu saja masing-masing akan membawakan materi yang berbeda. Dari kepolisian mungkin terkait perundang-undangan, dari Kodim tentang wawasan kebangsaan dan bela negara dan sebagainya,"

katanya.

Masih terkait kegiatan tersebut, Ketua MUI berharap dari pihak kejaksanaan membawakan materi tentang tata cara beracara di Pengadilan. Menurutnya hal itu penting sebab sebagian besar masyarakat kini tak mengetahui bagaimana cara beracara di pengadilan.

Ceng Munir menjelaskan, untuk kegiatan tersebut, 42 kecamatan yang ada di Garut akan dibagi menjadi 11 zona. "Peserta yang akan diberikan pembinaan adalah lembaga-lembaga yang ada di tingkat kecamatan, di antaranya ormas Islam, MUI kecamatan dan tokoh masyarakat. Akan mulai dilakukan mulai pertengahan Maret ini," jelasnya.

KH. Sirojul Munir menambahkan, selain materi tentang ajaran Islam yang benar, MUI juga akan menyampaikan materi tentang garis perjuangan MUI dalam konteks NKRI.

"Materi itu selaras dengan tugas pokok MUI yakni adalah mengawal ajaran Islam yang benar dan mengawal keutuhan NKRI. Jadi MUI juga memiliki tanggung jawab mengawal keutuhan negara bukan semata-mata di bidang agama," paparnya.

### Saran untuk Pemda

Ditanya soal janji politik Bupati dan Wakil Bupati, KH. Sirojul Munir menilai bahwa janji politik itu bisa dilaksanakan bisa juga tidak, tergantung situasi dan kondisi terutama setelah mempertimbangan aturan perundang-undangan yang ada. Jika menurut aturan perundang-undangan melanggar, tentu saja janji politik tak usah dilaksanakan sebab akan menanggung konsekuensi hukum.

Menurut KH. Sirojul Munir, kondisi tersebut relevan dengan janji politik Rudy Gunawan dan dr. Helmi saat kampanye dulu yang menjanjikan akan memberikan bantuan sarana lembaga keagamaan, membantu



DKM, membantu para ustadz dan sebagainya. "Namun janji ini sekarang memang kurang maksimal terealisasi di lapangan. Penyebabnya, bukan karena Pak Rudy dan Pak Helmi tak mau merealisasikannya, melainkan karena kerangka aturannya yang melarang," ujarnya.

Namun KH. Sirojul Munir berharap, dalam sisa waktu masa bakti duet Rudy-Helmi, janji itu bisa diwujudkan. "Saya mendapatkan informasi, ada aturan sekarang ini yang membolehkan pemberian hibah. Jika itu benar maka bupati dan wakil bupati bisa mewujudkan janjinya," katanya.

Harapan itu disampaikan KH. Sirojul Munir terkait dengan banyaknya warga Garut yang terus mempertanyakan janji Rudy-Helmi pada saat kampanye. "Bahkan pertanyaan itu sering pula disampaikan kepada saya, dan saya jawab bahwa Pak Rudy dan Pak Helmi bukan tak mau merealisasikan janjinya melainkan karena aturan yang melarang," katanya.

Terkait pembangunan infrastruktur, Ceng Munir menilai bahwa program Bupati Garut sangat bagus. Hal itu ditandai dengan dicanangkannya tahun infrastruktur sejak tahun-tahun lalu. "Ini mengisyaratkan bahwa Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sangat komit dan konsen dengan pembangunan infrastruktur. Dan kami tentu saja mendukungnya," katanya.

Hanya saja, KH. Sirojul Munir menyarankan agar bobot pengawasan lebih ditingkatkan agar pengerjaannya berkualitas. "Sanksi terhadap pelaksana yang menyimpang pun harus diterapkan secara tegas," katanya.

Adapun soal pelayanan kesehatan, dipandanginya masih dihadapkan kepada sejumlah tantangan. Hal itu terjadi akibat kurang memadainya tenaga atau sarana lembaga (fasilitas) kesehatan yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. "Jadi ketika berbicara peningkatan pelayanan kesehatan, maka harus ada peningkatan jumlah rumah sakit atau puskesmas, alat kesehatan di lembaga kesehatan pun harus ditingkatkan, begitu pula jumlah dokter dan tenaga medis lainnya," paparnya.

Ia mengatakan, jumlah penduduk Garut sekarang ini hampir menyentuh angka tiga juta, namun lembaga-lembaga pelayanan kesehatan masih bisa dihitungkan dengan jari. "Ini merupakan PR bagi kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai modal dan skill di bidang kesehatan," ujarnya.

Sementara ditanya soal pendidikan, KH. Sirojul Munir menilai bahwa Garut ada peningkatan. Ia menilai kebijakan Bupati dan Wakil Bupati melarang sekolah melakukan pungutan kepada siswa merupakan kebijakan yang perlu didukung. Padahal, katanya, Kemendikbud masih memberi ruang terhadap sekolah untuk meminta biaya tambahan kepada orang tua siswa seandainya di sekolah ada kegiatan yang biayanya tak bisa ter-cover oleh biaya pemerintah. "Namun duet Rudy-Helmi tak membolehkan adanya pungutan tersebut meskipun pemerintah pusat masih memberi ruang," jelasnya.

Di bidang akademik pun KH. Sirojul Munir menilai ada peningkatan. Hal itu terlihat dari dilaksanakannya ujian berbasis komputer yang telah bisa dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di Garut meski baru sebagian. "Itu artinya bahwa Garut sudah bisa berupaya mensejajarkan diri dengan daerah lain, terutama daerah ibu kota dalam pendidikan," ungkapnya. (\*)

**H**arley Davidson Club Indonesia (HDCI) memberikan sumbangan untuk Korban Bencana Banjir Bandang. Bantuan yang disalurkan bukan berbentuk sandang atau pangan, melainkan sebuah masjid di Kompleks Rumah Susun milik Dinas PUPR Kabupaten Garut yang kini dimanfaatkan 90 KK korban banjir bandang.

Menurut Ketua Pengcab HDCI Garut, H. Ato Hermanto, pembangunan masjid di rusun workshop Desa Mangkurakyat Kec. Cilawu Jalan Raya Bayongbong, berawal dari terjadinya bencana banjir di Garut beberapa bulan yang lalu. Saat HDCI tergerak untuk menggalang dana dari para anggotanya dan terkumpul dana sebesar 460 juta rupiah.

"Dikarenakan pada waktu itu bantuan yang datang ke Kabupaten Garut melimpah, maka HDCI Garut berkoordinasi ke HDCI pusat, dan diputuskan dana tersebut disumbangkan untuk pembangunan mesjid di rusun workshop.

Bupati Rudy Gunawan atas nama Pemerintah dan masyarakat, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar HDCI atas bantuan tersebut, berharap bantuan ini menjadi amal ibadah. Bantuan ini bukan saja 90 KK korban banjir yang diungsikan di rusun yang akan menikmatinya, namun warga sekitar pun akan merasakannya.

Menurut bupati, saat ini sedang dibangun rusun sebanyak dua unit yang dilakukan oleh Kementerian PUPR berlokasi di wilayah Kelurahan Margawati Kec. Garut Kota. Sedangkan di lokasi lain pihaknya tengah membangun diatas tanah milik pemkab seluas 3 hektar. "Namun kami tengah membeli lagi seluas 3 hektar, karena ada sumbangan masyarakat berupa rumah yang rencana rekonstruksinya dimulai bulan mei atau juni" ujar Bupati Rudy dihadapan Ketua HDCI dan rombongan.(\*)



## HDCI Sumbang Masjid untuk Korban Bencana Banjir Bandang





## IPHI Jabar Bertekad Bangkitkan Perekonomian Keumatan

**K**etua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Barat, H. Holil Aksan Umarzein menyatakan kesiapannya membangkitkan perekonomian keumatan. Untuk mendukung hal itu, IPHI bertekad membangun kemitraan seluas-luasnya untuk meng-upgrade IPHI Jabar menjadi pelopor persaudaraan antar umat, tanpa membedakan ras, suku dan bahasa dengan tetap menjunjung aksi amal shaleh di berbagai bidang.

Penegasan itu disampaikan Holil dalam dihadapan 200 peserta Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Barat, di Sumber Alam Resort Garut, Rabu (18/1).

IPHI, menurut Holil, merupakan salah satu organisasi yang sangat potensial, yang memiliki potensi sangat besar bila ada dorongan pemerintah. IPHI bisa dijadikan mitra pemerintah untuk mendorong perekonomian masyarakat. “Bayangkan saja, anggota IPHI di Jawa Barat berapa juta? Mereka sangat potensial, baik dari segi ekonomi begitu juga disiplin ilmunya”, ujarnya.

IPHI, lanjut Holil, merupakan aset penyelamat bangsa dengan mengedepankan rasa

persaudaraan antar umat muslim. Untuk itu pihaknya membuka diri dengan pihak pemerintah, swasta dan pihak lainnya yang bertujuan menyejahterakan masyarakat Jabar.

“IPHI bertekad menjadi pelopor persaudaraan antar umat, tidak membedakan ras, suku dan bangsa,” tegasnya, yang disambut applause peserta, termasuk Wakil Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar dan Bupati Garut Rudy Gunawan.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengapresiasi Rakerwil yang diselenggarakan di Kabupaten Garut. Menurutnya, sosok haji selain identik dengan status ekonomi juga ketauladanan, maka



keberadaan IPHI diyakini memiliki kekuatan magnet, terutama di bidang politik karena ia menjadi vote getter. “Secara politis jangan dianggap remeh, karena selain identik dengan katauladanan, juga meliki daya magnet yang luar biasa”, pungkasnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Dedy Wizawar, menginginkan IPHI Jawa Barat dapat mendirikan koperasi, agar dengan kekuatan yang ada dapat membangun cita-cita IPHI mendirikan rumah sakit IPHI. “Bila dihitung kasar, misalkan jumlah anggota IPHI dua juta orang dengan simpanan hanya lima puluh ribu rupiah saja, maka bisa dibayangkan dalam sebulan sudah terkumpul seratus milyar rupiah. Bila separunya saja yang aktif, maka bisa terakumulasi dana yang ada sebesar lima puluh milyar. Potensi ini bisa memungkinkan cita-cita membangun rumah sakit IPHI bisa terwujud”, tegasnya yang disambut tepuk tangan peserta.

Rakerwil V IPHI Jawa Barat berthema “Revitalisasi dan Konsolidasi Organisasi untuk Membangun Kemitraan dan Persaudaraan dalam Rangka Mendorong Kemajuan Pendidikan Ekonomi dan Kesehatan masyarakat Jawa Barat”, berlangsung selama dua hari (18-19 Januari 2017).(\*)



## Bupati Resmikan Bumdes Smart Desa Mekarhurip

**B**upati Garut Rudy Gunawan SH, MH, MP, Selasa (14/02/2017) meresmikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Smart Desa Mekarhurip Kecamatan Sukawening.

Dalam mendirikan Bumdes tentunya mempunyai tujuan meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Bupati dalam sambutannya menyebutkan pembangunan ekonomi harus dimulai dari desa dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan dan berharap pertumbuhan. Bumdes ini harus menjadi pilar terdepan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri.

“Pembangunan ekonomi bukan dari kota ke desa, melainkan harus mengembangkan dari desa ke kota itu yang disebut dengan ekonomi kerakyatan,” ungkapnya.

Bupati pun berharap Bumdes ini bisa berkembang sehingga kebutuhan warga masyarakat Desa Mekarhurip pada khususnya, bisa terpenuhi sehingga tidak perlu ke luar desa untuk membeli kebutuhan baik sembako dan lain-lain.

“Pihak pemerintah Kabupaten pun akan memberikan bantuan berupa kantor desa, untuk Desa Mekarhurip dikarenakan kantor Desa yang diduduki sekarang masih terasa kurang layak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Bupati.(\*)

## Wabup Hadiri Seminar Kesehatan Nasional

**W**akil Bupati Garut dr. Helmi Budiman membuka secara resmi seminar Kesehatan Nasional bertempat di SMKN 1 Garut, Sabtu (11/02/2017).

Kegiatan yang mengangkat tema “Melindungi generasi muda dengan cara menjaga kesehatan reproduksi berdasarkan perspektif kesehatan sosial dan spritual peranan tenaga kesehatan dalam penanggulangan kanker payudara dan kanker leher rahim”.

Sebagai narasumber oleh dokter Boyke yang diundang secara langsung oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Kabupaten Garut untuk memberikan pemahaman masalah kesehatan. Acara ini pun dihadiri oleh ratusan bidan setiap perwakilan dari daerah yang berda di Kabupaten Garut.

Dalam sambutannya Wabup menyampaikan pentingnya menjaga

kesehatan dan membiasakan hidup sehat. Semakin mudahnya budaya asing masuk ke negara kita yang secara tidak langsung sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dan pada remaja khususnya.

“Masuknya nilai-nilai budaya asing memberikan efek positif maupun negatif terhadap kehidupan bermasyarakat termasuk adanya ancaman seks bebas pada generasi muda yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa,” Ungkapnya.

Wabup pun menambahkan pentingnya peran seorang bidan dalam penanganan dalam kesehatan, apalagi peran bidan yang berada di wilayah terpencil perlu perhatian secara khusus oleh pemerintah Kabupaten Garut.(\*)



Penonton memadati Arlamba Rancabango Tarogong Kaler menyaksikan Seni Tangkas Domba Garut pada 11-12 Februari 2017 yang digelar Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) DPC Garut. Kegiatan yang sekaligus memeriahkan HJG ke-204.



TERJUN LANGSUNG TANGANI BENCANA BANJIR BANDANG







## **PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### **VISI**

**Memberikan Pelayanan dan Penyedia Informasi yang Mudah,  
Terpercaya, Akurat dan Bermartabat**

### **MISI**

Meningkatkan Kualitas SDM Pelayanan Informasi Melalui Berbagai Media Komunikasi  
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Telekomunikasi  
Meningkatkan Keterbukaan Informasi Melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik

**PPID**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**MCAP**

MOBILE COMMUNITY ACCESS POINT



[www.garutkab.go.id](http://www.garutkab.go.id)

**SIJARDU**  
SISTEM JARINGAN TERPADU



Diskominfo Kabupaten Garut



@DiskominfoGRT



Diskominfo Garut